



LAPORAN PEMERINGKATAN BANK 2018

Berdasarkan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan



Laporan Pemeringkatan Bank 2018

Berdasarkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dwi Rahayu Ningrum
Fiona Armintasari



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Laporan Pemeringkatan Bank 2018

ISBN: 978-623-95082-6-5

Tim Penulis:

Dwi Rahayu Ningrum
Fiona Armintasari

Tim Peneliti:

Agung Boediono
Anggara Yudha Zunivar
Aryanto Nugroho
Dwi Rahayu Ningrum

Tim Pengulas:

Dia Mawesti

Desain dan Tata Letak:

Dedi Sunarya

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA
Jl. Rawa Bambu 1 Blok A No. 8E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Indonesia

© 2019 ResponsiBank Indonesia



Koalisi ResponsiBank Indonesia adalah sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang giat mendorong tanggung jawab industri keuangan di Indonesia pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan. Sebagai pihak yang memiliki peran intermediari untuk menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan investasi serta menyalurkannya kembali melalui kredit dan investasi, industri keuangan, khususnya perbankan, tidak dapat hanya memperhatikan aspek finansial (*profit*) melainkan harus mempertimbangkan manusia (*people*), lingkungan (*planet*), kesejahteraan umum (*prosperity*), dan perdamaian (*peace*). Untuk menghindari dampak negatif atas kredit dan investasi yang disalurkan, perbankan perlu untuk memiliki kebijakan yang komprehensif dan cermat sebagai bagian integral dari praktik bisnis mereka. Peningkatan ini dilakukan oleh peneliti dari Koalisi ResponsiBank Indonesia yang terdiri dari sepuluh organisasi masyarakat sipil yaitu:

- **Perkumpulan PRAKARSA**
www.theprakarsa.org
- **INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)**
www.infid.org
- **ICW (Indonesia Corruption Watch)**
www.antikorupsi.org
- **PWYP (Publish What You Pay) Indonesia**
www.pwyp-indonesia.org
- **Walhi (Wahana Lingkungan Hidup)**
www.walhi.or.id
- **YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)**
www.ylki.or.id
- **TuK Indonesia (*Transformasi untuk Keadilan*)**
www.tuk.or.id
- **INDIES (The Institute for National and Democratic Studies)**
www.indies.or.id
- **Lokataru Foundation**
www.lokataru.id
- **Kemitraan (The Partnership for Government Reform)**
www.kemitraan.or.id

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
BCA	Bank Central Asia
BJB	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
BNI	Bank Negara Indonesia
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BRI	Bank Rakyat Indonesia
CIMB	<i>Commerce International Merchant Bankers</i>
DBS	<i>The Development Bank of Singapore</i>
EITI	<i>Extractive Industry Transparency Initiative</i>
ESRM	<i>Environmental and Social Risk Management</i>
EU	<i>European Union</i>
FPIC	<i>Free Prior and Informed Consent</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GRI	<i>Global Reporting Initiative</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HSBC	<i>Hong Kong Shanghai Banking Corporation</i>
ICBC	<i>Industrial and Commercial Bank of China</i>
ICMM	International Council for Metal and Mining
ICW	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>

Infid	<i>International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development</i>
ISPO	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil system</i>
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
OECD	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
PWYP	<i>Publish What You Pay</i>
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
UFJ	<i>United Financial of Japan</i>
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UN	<i>United Nations</i>
Walhi	Wahana Lingkungan Hidup
WCD	<i>World Commission on Dams</i>
YLKI	Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	iv
	vi
DAFTAR TABEL	vii
	vii
01	
PENDAHULUAN	2
Pendahuluan	5
	02
	METODOLOGI
	6
	7
	8
	9
	Pemilihan Bank
	Metode Penilaian
	Isu/Tema
03	
HASIL PENILAIAN	24
Peringkat Bank Secara Umum	25
Penjelasan Perolehan Nilai Per Tema dan Sektor	28
	04
	PENJELASAN PEROLEHAN NILAI PER BANK
	50
	51
	Peringkat Bank Secara Umum

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penilaian Bank per Tema dan Sektor (dalam persen)	26
--	----

DAFTAR TABEL

Grafik 1. Nilai Konsolidasi dan Peringkat Bank Secara Umum	25
Grafik 2. Peringkat Bank pada Tema Perubahan Iklim	28
Grafik 3. Peringkat Bank pada Tema Korupsi	29
Grafik 4. Peringkat Bank pada Tema Kesenjangan Gender	31
Grafik 5. Peringkat Bank pada Tema Hak Asasi Manusia	32
Grafik 6. Peringkat Bank pada Tema Hak-Hak Pekerja	33
Grafik 7. Peringkat Bank pada Tema Keaneekaragaman Hayati	34
Grafik 8. Peringkat Bank pada Tema Perpajakan	36
Grafik 9. Peringkat Bank pada Tema Persenjataan	38
Grafik 10. Peringkat Bank pada Sektor Pangan	39
Grafik 11. Peringkat Bank pada Sektor Kehutanan	40
Grafik 12. Peringkat Bank pada Sektor Industri Manufaktur	41
Grafik 13. Peringkat Bank pada Sektor Pertambangan	42
Grafik 14. Peringkat Bank pada Sektor Minyak dan Gas	43
Grafik 15. Peringkat Bank pada Sektor Pembangkit Listrik	44
Grafik 16. Peringkat Bank pada Perlindungan Konsumen	45
Grafik 17. Peringkat Bank pada Inklusi Keuangan	47
Grafik 18. Peringkat Bank pada Tema Remunerasi	48
Grafik 19. Peringkat Bank pada Tema Transparansi dan Akuntabilitas	49

Grafik 20. Nilai BNI pada Semua Tema dan Sektor 2018	52
Grafik 21. Nilai BRI pada Semua Tema dan Sektor 2018	54
Grafik 22. Nilai Bank Mandiri pada Semua Tema dan Sektor 2018	58
Grafik 23. Nilai BCA pada Semua Tema dan Sektor Tahun 2018	60
Grafik 24. Nilai CIMB-Niaga pada Semua Tema dan Sektor 2018	63
Grafik 25. Nilai Bank Danamon pada Semua Tema dan Sektor 2018	64
Grafik 26. Nilai Bank BJB pada Semua Tema dan Sektor 2018	67
Grafik 27. Nilai Bank Permata pada Semua Tema dan Sektor 2018	69
Grafik 28. Nilai Maybank pada Semua Tema dan Sektor 2018	71
Grafik 29. Nilai HSBC pada Semua Tema dan Sektor	72
Grafik 30. Nilai DBS pada Semua Tema dan Sektor	75

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 PENDAHULUAN



“ Secara global, tren keuangan dunia mengalami transisi dari sistem keuangan konvensional yang berorientasi profit menuju sistem keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Data Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) menunjukkan bahwa total investasi berkelanjutan tumbuh sebesar 34 persen dalam dua tahun atau mencapai US\$ 30,7 triliun pada 2018. Rasio investasi berkelanjutan terhadap total pembiayaan juga terus mengalami peningkatan. Hal ini karena munculnya kesadaran bahwa investasi maupun pembiayaan yang tidak bertanggung jawab dapat meningkatkan risiko pembiayaan khususnya risiko kredit akibat tingginya gagal bayar (Hadad & Maftuchah, 2015).

Isu keuangan berkelanjutan di Indonesia saat ini semakin mengemuka. Hal ini karena adanya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mengatur keuangan berkelanjutan di Indonesia yang dianggap sudah cukup maju. Indonesia telah memiliki Peta jalan Keuangan Berkelanjutan Indonesia periode 2014-2019 yang dilengkapi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Kebijakan ini mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk menyerahkan Laporan Keberlanjutan dan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Pada implementasinya, transisi sistem keuangan konvensional menuju keuangan berkelanjutan di Indonesia berjalan lambat. Lima tahun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia masih belum secara jelas memberikan mandat kepada Lembaga keuangan bank atau pun non bank untuk memitigasi dampak negatif investasi dan kredit melalui pengelolaan risiko yang mengintegrasikan prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata kelola (LST).

Walaupun bukan pihak yang secara langsung menyebabkan kerusakan, proyek-proyek dan perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh industri keuangan dapat menyebabkan deforestasi dan pemindahan paksa masyarakat lokal; pabrik-pabrik yang beroperasi secara tidak bertanggung jawab tanpa penerapan standar emisi karbon yang disiplin serta tanpa pengolahan limbah yang memadai mengakibatkan polusi, pencemaran tanah, badan air dan udara serta kerusakan lingkungan lainnya, yang pada akhirnya menghancurkan tempat masyarakat mencari nafkah, sehingga menyebabkan proses pemiskinan.

Oleh karena itu, masyarakat sipil dunia dan di Indonesia pada khususnya, memandang bahwa industri keuangan tidak dapat lepas sama sekali dari

tanggung jawab dalam aspek-aspek sosial dan lingkungan hidup. Sama halnya dengan industri dan sektor lainnya, -walaupun memiliki peranan tidak langsung, dalam fungsi intermediasinya sebagai lembaga yang membiayai proyek maupun perusahaan-perusahaan semacam itu, industri keuangan tidak dapat dilihat terisolasi dalam sistem ekonomi yang saling terkait.

Relasi antara industri keuangan dan masyarakat dapat langsung dilihat dalam kerangka relasi dengan konsumen. Konsumen sebagai pemangku kepentingan yang krusial perlu dibekali dengan sarana yang dapat membantu mereka untuk menilai, apakah industri keuangan telah secara bertanggung jawab menjalankan bisnisnya.

Perangkat ini adalah sarana bagi konsumen untuk menilai apakah bank/industri keuangan telah mempertimbangkan aspek sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup dalam *core business* mereka, yaitu dalam kebijakan pemberian pinjaman dan atau investasi mereka, sehingga bukan hanya unsur *profit* yang menjadi tujuan satu-satunya keberadaan lembaga keuangan, namun unsur-unsur *people, planet, profit* senantiasa dipertimbangkan.

Jejaring masyarakat sipil di sembilan negara yang tergabung dalam *Fair Finance Guide International* menggunakan perangkat penilaian serupa untuk mendorong industri keuangan yang peka terhadap aspek

lingkungan, sosial, dan tata kelola di negara masing-masing. Kesembilan negara tersebut adalah Belanda, Belgia, Brazil, Indonesia, Jepang, Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia.

Pada awalnya, pemeringkatan ini hanya dilakukan untuk sektor perbankan, namun di beberapa negara pemeringkatan juga dilakukan pada lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Di Indonesia, pemeringkatan baru dilakukan pada sektor perbankan.

TUJUAN

Tujuan dilakukannya pemeringkatan ini adalah untuk mendorong agar industri keuangan yang beroperasi di Indonesia berkompetisi menjadi yang terbaik atau melakukan *'race to the top'* dalam meningkatkan sensitivitas

kebijakan pemberian pinjaman dan atau investasi mereka terhadap aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola.

2 METODOLOGI



Pemilihan Bank

Tahun ini terdapat 11 bank yang dinilai di Indonesia yang mewakili kelompok bank umum/ komersial terbesar di Indonesia baik dalam hal ukuran aset maupun besaran modal



Mengacu pada klasifikasi perbankan di Indonesia, empat bank pertama (BCA, BRI, Mandiri dan BNI) adalah bank komersial nasional terbesar yang masuk dalam kategori bank BUKU 4 dengan modal inti mulai dari 30 triliun rupiah. Empat bank berikut (CIMB-Niaga, Danamon, Panin dan OCBC-NISP) adalah 4 bank terbesar dalam kategori BUKU 3 (modal inti Rp 5 triliun - Rp 30 triliun). Total *share* dari kesebelas bank yang menjadi 'sampel' dalam pemeringkatan ini adalah 61% dari seluruh aset perbankan di Indonesia dan 82% dari seluruh modal inti perbankan di Indonesia.

Assessment hanya dilakukan terhadap bank-bank umum di kelompok ini, dan tidak dilakukan terhadap 11 bank lain dalam BUKU 3, bank-bank dalam kategori BUKU 2 dan BUKU 1 atau bank-bank berbasis syariah maupun Bank-bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat (BPR),

inti yang dimiliki. Ke-11 bank ini dipilih sesuai dengan data keuangan industri perbankan pada akhir tahun 2017. Bank-bank tersebut adalah:

karena keterbatasan kapasitas.

Walaupun pada awalnya hanya bank-bank nasional yang akan didorong untuk meningkatkan sensitifitas nya terhadap isu-isu sosial dan lingkungan hidup, dari hasil *trial assessment* yang dilakukan oleh peneliti, skor bank-bank nasional cukup rendah sehingga diputuskan untuk juga mengikutkan beberapa bank asing terbesar di Indonesia (HSBC, Citibank dan UFJ-Mitsubishi) untuk menjadi perbandingan bagi bank-bank nasional dalam mempublikasikan kebijakan-kebijakan sosial dan lingkungan hidup mereka.

Untuk tahun ini, ada sedikit perbedaan untuk bank-bank campuran modal asing. Untuk bank dengan induk perusahaan (holding) yang juga merupakan bank seperti OCBC-NISP yang di Indonesia adalah subsidiary dari kelompok bisnis OCBC yang bisnis utamanya adalah perbankan dan berbasis di Singapura

atau CIMB-Niaga yang di Indonesia adalah *subsidiary* dari kelompok bisnis CIMB yang bisnis utamanya adalah juga perbankan dan berbasis di Malaysia, mereka dinilai atas dasar publikasi data di laman web perusahaan induk mereka di Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk bank campuran seperti Bank Danamon, yang mayoritas kepemilikannya adalah Asia Financial Group, yang adalah perusahaan keuangan non-perbankan dan berbasis di Singapura, penilaian dilakukan atas publikasi dalam laman web Bank Danamon sendiri.

Metode Penilaian

Perangkat ini^[1] menilai kebijakan pemberian kredit/pinjaman atau investasi lembaga keuangan, khususnya bank dalam beberapa tema terkait isu sosial dan hak asasi manusia, serta lingkungan hidup yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh lembaga keuangan seperti bank. Namun untuk beberapa tema, karena pertimbangan aspek tanggungjawab lembaga keuangan terhadap keadilan ekonomi pada umumnya, juga menilai aspek kebijakan internal/operasional bank. Tema-tema tersebut misalnya tema inklusi keuangan, remunerasi, perpajakan dan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas.

Penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia atau dokumen yang dapat diakses secara publik. Responsibank mengharapkan kebijakan

lembaga keuangan, atau setidaknya ringkasannya, dapat diakses oleh publik, misalnya melalui *website* mereka atau dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan mereka.

Nama atau topik dokumen kebijakan tidak relevan, misalnya elemen pada hak-hak pekerja bisa saja dimasukkan dalam kebijakan lembaga keuangan mengenai hak asasi manusia secara umum. Untuk penilaian yang dilakukan pada tahun 2016 misalnya, Laporan yang dinilai adalah Laporan Tahunan tahun 2015 atau Laporan Keberlanjutan tahun 2015.

Perangkat penilaian Responsibank ini tidak menilai praktik-praktik yang dilakukan oleh bank/lembaga keuangan karena pertimbangan metodologis. Untuk menanggapi perbedaan antara kebijakan bank dan praktik yang mereka lakukan, akan dilakukan studi kasus, paling tidak sekali setahun untuk tema-tema atau sektor-sektor terpilih.

Tema yang dipilih adalah isu-isu yang menjadi keprihatinan/concern dari masyarakat internasional, yang merupakan isu overarching serta relevan dengan konteks Indonesia.



Perubahan Iklim (Climate Change)

Diskusi tentang perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari upaya penurunan emisi karbon. Oleh karena itu sangat penting untuk menargetkan tujuan pengurangan emisi yang ketat sekarang sehingga dunia usaha terdorong untuk mengurangi emisi CO₂. Karena merupakan pemberi dana yang penting untuk proyek-proyek energi, lembaga keuangan dapat memainkan peranan penting dengan mulai mengarahkan investasi mereka ke arah ekonomi rendah karbon. Dalam tema ini, lembaga keuangan diharapkan dapat menerapkan standar pengurangan CO₂ yang sejalan dengan tujuan-tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan mengurangi pemanasan global. Lembaga keuangan dinilai berdasarkan beberapa elemen terkait kebijakan operasional internal dan kebijakan investasi lembaga keuangan dalam mempertimbangkan entitas/perusahaan yang mereka berikan pinjaman.



Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan yang sangat terlihat antara perempuan dan laki-laki baik dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lembaga-lembaga publik dan swasta dapat melanggar hak akses yang sama terhadap pelayanan publik, kesetaraan dan non-diskriminasi. Situasi ini memperlihatkan dan menggambarkan bagaimana kegiatan usaha dapat menciptakan atau memperburuk ketidaksetaraan gender. Namun, sektor swasta itu sendiri menjadi pendorong perubahan, terutama dengan bukti yang berkembang bahwa kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan berkontribusi penting untuk keuntungan ekonomi dan efektivitas bisnis. Kebijakan lembaga keuangan, baik sebagai pemberi kerja langsung dan sebagai pengaruh di bagian lain dari rantai nilai, dapat memiliki dampak yang besar pada pencapaian kesetaraan gender.



Hak Asasi Manusia (Human Rights)

Walaupun lembaga keuangan pada umumnya tidak terlibat langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mereka dapat dimintai pertanggungjawaban juga jika perusahaan atau pemerintah dimana mereka berinvestasi melanggar HAM. Tanggungjawab untuk menghormati HAM mengisyaratkan bahwa perusahaan tidak boleh menyebabkan, atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM akibat aktifitas mereka, namun mereka juga harus mencoba untuk mencegah atau memitigasi terjadinya dampak negatif terhadap HAM karena relasi bisnis mereka; jika itu terkait dengan operasional mereka, produk atau layanan mereka, walaupun mereka tidak langsung berkontribusi pada dampak tersebut secara langsung. Dalam rangka menghindari agar debitur yang didanai tidak terlibat dalam pelanggaran HAM, lembaga keuangan memerlukan kebijakan HAM dengan standar dan garis kebijakan yang jelas. Suatu kebijakan yang secara umum hanya memuat tujuan umum saja tidak akan cukup efektif. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan elemen-elemen terkait HAM yang termuat dalam kebijakan pemberian pinjaman/ investasi lembaga keuangan terhadap entitas/ perusahaan yang mereka berikan pinjaman.



Korupsi (Corruption)

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan pada bidang politik, sosial dan lingkungan. Di bidang politik, korupsi merupakan hambatan besar ketika mengembangkan aturan hukum. Perwakilan pemerintah kehilangan legitimasi ketika banyak penyalahgunaan kantor mereka untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga memiliki dampak negatif pada bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan pelarian modal dan pengeluaran dana publik langka untuk proyek prestise yang tidak menguntungkan, daripada untuk infrastruktur yang lebih dibutuhkan, seperti sekolah, rumah sakit dan pasokan air minum. Praktik lobi dapat berdampak sama seperti korupsi. Meskipun praktik

lobi seperti itu tidak juga dapat dikatakan sebagai korupsi, terkadang pelobi berusaha sekuat mungkin untuk mempengaruhi legislator dan regulator yang hampir bisa dianggap sebagai korupsi. Salah satu hal yang dapat diharapkan dari kegiatan lembaga keuangan yang bertanggung jawab adalah mereka tidak secara sengaja membantu nasabah atau klien yang melakukan penghindaran pajak dan lembaga keuangan itu sendiri tidak menghindari pajak. Selain itu, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk hanya memberikan layanan keuangan kepada perusahaan yang membayar pajak terutang di negara tempat mereka beroperasi dan tidak terlibat dalam korupsi serta berpengaruh buruk pada perkembangan norma-norma internasional.



Hak-Hak Pekerja (Labour Rights)

Sebagaimana perusahaan lainnya, lembaga keuangan diharapkan menghormati peraturan-peraturan dan sistem hukum lokal, nasional dan internasional dan mengesahkan empat prinsip fundamental ILO, hak-hak pekerja dan Deklarasi Tripartit dalam jangkauan pengaruh mereka (sebagai pemberi kerja, dalam investasi mereka dan dalam rantai produksi mereka). Namun Panduan Responsibank (*Fair Finance Guide*) ini hanya menilai kebijakan investasi dan bukan kebijakan sumber daya manusia internal dari lembaga keuangan. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan elemen-elemen kebijakan investasi mereka terkait hak-hak pekerja dalam entitas/perusahaan yang diberikan pinjaman oleh mereka.



Keanekaragaman Hayati (Nature)

Lembaga keuangan dapat mempengaruhi perlindungan alam, terutama jika mereka berinvestasi pada industri yang berpotensi menyebabkan dampak serius terhadap keanekaragaman hayati seperti kehutanan, industri ekstraktif, industri minyak dan gas, perikanan, penyaluran air dan infrastruktur dan industri yang menggunakan material genetik seperti pertanian,

bioteknologi, industri medis dan kosmetik. Untuk perusahaan ada beberapa dasar untuk menempatkan keanekaragaman hayati sebagai agenda penting mereka. Aturan dan supervisi yang ketat untuk melindungi ekosistem, meningkatnya biaya dalam rantai produksi yang bergantung pada ekosistem tertentu, perubahan dalam pola konsumsi dan tekanan dari masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan merupakan alasannya. Manfaat lain ialah, kesempatan usaha baru bagi perusahaan bisa muncul jika perdagangan dan pengelolaan alam berjalan bersamaan secara bertanggungjawab. Lembaga keuangan dapat memanfaatkan fenomena ini. Untuk menjawab risiko terhadap alam dan ancaman lain terhadap keanekaragaman hayati, lembaga keuangan harus menyusun suatu kebijakan investasi yang sejalan dengan konvensi internasional dan legislasi nasional.



Perpajakan (Tax)

Penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang adil berkontribusi lebih untuk pengembangan masyarakat demokratis yang sehat, dibandingkan penerimaan dari bantuan pembangunan atau dari ekspor bahan baku. Banyak lembaga-lembaga keuangan internasional memiliki cabang di negara-negara surga pajak untuk membantu klien mereka dan untuk membatasi pembayaran pajak mereka sendiri. Jika ini jenis konstruksi melanggar hukum, ini disebut penggelapan pajak, tetapi bahkan jika ini tidak terjadi - dalam kasus penghindaran pajak - jenis perilaku ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan: hal ini secara sosial tidak bertanggung jawab untuk menyingkirkan pemerintah dari pendapatan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan negara mereka secara sosial dan ekonomi. Yang dapat diharapkan dari kegiatan lembaga keuangan yang bertanggung jawab adalah mereka tidak sengaja membantu klien dalam menghindari pajak dan mereka pun

juga tidak menghindari pajak. Selain itu, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk hanya memberikan layanan keuangan kepada perusahaan yang membayar pajak yang terutang di negara tempat mereka beroperasi.



Persenjataan (Arms)

Negara memiliki hak - dan kewajiban - untuk melindungi warga sipil mereka dan secara individual atau kolektif menjaga keamanan. Tanggung jawab negara terhadap keamanan publik meliputi mengatur, memeriksa dan memantau pembuatan, transfer, kepemilikan, penimbunan dan penggunaan senjata. Namun dalam prakteknya, ruang bagi pemerintah dan badan-badan multilateral (seperti Dewan Keamanan PBB) untuk memantau perdagangan senjata internasional sangat kurang. Laporan penelitian masyarakat sipil menunjukkan bagaimana industri senjata, -meskipun ada peraturan, terus menjual senjata ke rezim yang melanggar hak asasi manusia dan ke zona konflik, menggunakan celah dalam hukum untuk menghindari embargo senjata dan kontrol ekspor. Bahkan lebih daripada sektor lain, lembaga keuangan harus hati-hati mempertimbangkan investasi mereka di pabrik senjata dan pedagang senjata. Pertama, karena menyangkut produk mematikan. Selain itu, karena arus pasar dan perdagangan yang tidak transparan dan industri ini memiliki sejarah korupsi dan pelanggaran hukum. Dengan pinjaman dan/atau investasi di industri ini, lembaga keuangan dapat terlibat dalam transaksi yang mendasari pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, konflik bersenjata, korupsi, dan produksi senjata kontroversial, menjadi senjata yang dilarang oleh konvensi senjata internasional yang ada. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/ investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.



Pangan (Food)

Sektor pangan terdiri dari perusahaan pertanian, termasuk keluarga sebagai produsen berskala kecil, perusahaan pengolahan makanan dan perusahaan ritel. Kelompok yang beragam ini membentuk rantai suplai makanan. Sektor pengolahan makanan termasuk semua perusahaan yang terlibat dalam pengolahan

makanan, serta perdagangan komoditas pangan yang berkaitan dengan pengolahan makanan dan pengolahan ikan, dan perusahaan minuman. Industri pengolahan makanan meliputi berbagai kelompok perusahaan yang terlibat dalam pengolahan produk seperti ikan, daging, susu, tanaman pangan dan air. Ini mencakup jutaan Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan juga beberapa perusahaan terbesar di dunia. Banyak perusahaan menyuplai produk secara langsung kepada konsumen, sementara yang lain mengkhususkan diri dalam kegiatan *Business-to-Business* (bahan baku, pasar komoditas). Beberapa perusahaan secara langsung berpartisipasi dalam semua bidang produksi makanan, dari kegiatan pertanian, melalui produksi akhir dan eceran. Lainnya terkonsentrasi lebih di ujung atas dari rantai produksi atau membeli melalui pasar komoditas. Lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam sektor pertanian karena mereka membiayai produsen, pengolah dan pedagang produk pertanian. Selain itu, lembaga keuangan kadang mengambil posisi di pasar untuk bahan mentah pertanian, yang mungkin dapat menyebabkan harga pangan meningkat. Atas dasar ini, lembaga keuangan membawa tanggung jawab bersama bagi keberlanjutan sektor ini. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/ investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.



Kehutanan (Forestry)

Sekitar 30% dari permukaan bumi - hampir 4 miliar hektar - ditutupi hutan. Dari jumlah ini, sekitar 271 juta hektar merupakan hutan tanaman kayu. Meskipun memiliki fungsi yang sama sekali berbeda, perkebunan sering diklasifikasikan sebagai 'hutan'. Hutan dan perkebunan memainkan peran penting di bumi dan memberikan manusia berbagai manfaat. Deforestasi dan degradasi hutan mencabut masyarakat lokal dari mata pencaharian mereka, menyebabkan hilangnya

keanekaragaman hayati, erosi tanah dan penurunan permukaan dan air tanah. Selain itu, deforestasi juga menyebabkan kebakaran hutan yang berbahaya. Karena polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran ini, timbul masalah pernapasan – seperti asma, bronkitis dan pneumonia – juga akibat lain seperti masalah mata dan kulit. Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh kerusakan hutan untuk tujuan ekspansi perkebunan skala besar untuk industri pulp dan kelapa sawit. Lembaga keuangan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Lembaga keuangan dapat melakukannya dengan membentuk kebijakan yang ketat untuk investasi di sektor kehutanan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sektor kehutanan, baik hutan, penebangan kayu, pulp, kertas dan produksi mebel serta perusahaan pengolahan dan perdagangan kayu lainnya. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.



**Industri
Manufaktur**
(*Manufacturing
Industry*)

Industri manufaktur mencakup semua industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk baru. Oleh karena itu, industri manufaktur terdiri dari berbagai industri seperti industri otomotif, industri kimia, industri makanan, industri plastik, industri pakaian, galangan kapal, industri elektronik, industri metalurgi, industri grafis dan industri lainnya. Perbedaan antara kegiatan industri ini terkadang cukup besar. Industri kimia misalnya ditandai dengan modal yang tinggi dan intensitas pengetahuan sementara industri kayu dan furnitur ditandai dengan modal yang rendah dan intensitas pengetahuan. Kesamaan apa yang dimiliki oleh industri manufaktur ini pada umumnya adalah ditandai dengan rantai yang kompleks di mana banyak pemasok bahan baku, komponen dan produk setengah jadi yang memiliki peran di dalamnya. Pada

saat yang sama, ada juga aspek sosial dan lingkungan yang negatif untuk industri manufaktur. Globalisasi dan meningkatnya persaingan internasional memastikan bahwa kondisi kerja dan hak-hak pekerja berada di bawah tekanan. Untuk dapat bersaing dan memastikan sebuah pekerjaan, para pekerja harus pasrah terhadap ini. Hal ini berlaku untuk negara yang kaya, negara-negara industri, tetapi hampir sama bahkan untuk negara-negara berkembang sekalipun. Dalam tema ini, perangkat ini menilai kebijakan pemberian kredit/ investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/ investasi.



Pertambangan (Mining)

Dampak dari industri ekstraktif seperti pertambangan dapat terasa seketika ataupun jangka panjang setelah kegiatan ekstraktif itu telah selesai. Umumnya, upaya perbaikan saja tidak cukup untuk mengembalikan kelestarian alam di daerah industri ekstraktif. Masalah jangka panjang - seperti bocornya asam dari tambang - dapat mencemari badan air di sekitarnya selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Selain itu, pertambangan bijih mineral dan juga pemurnian bijih-bahkan dengan menggunakan teknologi modern sekalipun - menyebabkan polusi udara yang luas. Masalah umum dalam industri ekstraktif adalah bahwa perusahaan tambang tidak menghormati hak penduduk setempat atas tanah. Perusahaan kerap merampas lahan dan hutan tempat komunitas setempat menandalkan mata pencaharian mereka. Selain itu, polusi tambang dapat menyebabkan akumulasi logam berat dalam tanah, air dan udara di sekitarnya. Ketika lembaga keuangan berinvestasi di perusahaan tambang, mereka harus menyadari apakah perusahaan mematuhi panduan-panduan internasional dan kesepakatan-kesepakatan di bidang sosial dan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa dalam kebijakan investasi lembaga keuangan, norma-norma yang jelas perlu disusun.



Minyak Bumi Dan Gas (Oil And Gas)

Beberapa proses dalam industri minyak bumi dan gas dapat membahayakan lingkungan. Pengeboran, fasilitas produksi minyak dan gas bumi, pembakaran, dan kilang dapat mencemari tanah, udara dan air. Harga minyak yang tinggi dan dorongan untuk mengisi cadangan minyak bumi menyebabkan perusahaan-perusahaan minyak menembus jauh lebih dalam ke wilayah-wilayah yang rentan secara ekologis. Keretakan pipa yang disebabkan oleh gempa bumi, sebab alam lainnya dan sabotase dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan bahkan ledakan fatal dan kebakaran. Selain itu, minyak yang tumpah dari kapal tanker yang terlibat dalam kecelakaan telah mencemari banyak wilayah laut dan pesisir. Konsekuensi sosial dari industri minyak dan gas juga bisa sangat merugikan. Polusi dan penyakit menular membahayakan kesehatan, keamanan pangan dan budaya penduduk asli. Seringkali, perusahaan minyak dan gas mengambil tanah masyarakat lokal dan mengalihkan mereka dari sumber makanan dan penghidupan mereka. Kebijakan investasi lembaga keuangan di sektor minyak dan gas harus menekankan bahwa tantangan utama untuk sektor minyak bumi dan gas adalah untuk mengurangnya dan menuju pengembangan energi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan lembaga keuangan harus menyertakan norma-norma sosial dan lingkungan untuk sektor minyak bumi dan gas.



Pembangkit Listrik (Power Generation)

Pembangkit listrik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, dan merupakan hal penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Pemasok energi perlu menghasilkan tenaga listrik dengan menawarkan keamanan pasokan, terjangkau bagi konsumen, dan yang memiliki dampak lingkungan yang minimal. Energi, termasuk listrik dan panas untuk bisnis dan rumah tangga

serta energi untuk transportasi, adalah sumber emisi gas rumah kaca buatan manusia terbesar (64% dari seluruh emisi global), -pembangkit listrik dan panas merupakan komponen terbesar. Lembaga keuangan yang berinvestasi di sektor energi harus hati-hati mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengarahkan investasi mereka untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan peta jalan yang disarankan oleh IPCC. Mereka dapat memilih untuk membiayai pembangkit energi terbarukan secara khusus, atau dengan menetapkan roadmap yang jelas untuk mengurangi pembiayaan sumber energi berbahan bakar fosil yang kontroversial dan menggantinya dengan pembiayaan rendah karbon. Lembaga keuangan yang berinvestasi dalam pembangunan proyek bendungan misalnya, harus mengembangkan kebijakan sektoral untuk investasi menurut rekomendasi dari Komisi Dunia untuk Bendungan (WCD). Kebijakan ini setidaknya harus berlaku untuk semua proyek bendungan besar, tetapi idealnya mencakup semua proyek infrastruktur air penting.



Perlindungan Konsumen (Consumer Protection)

Konsumen adalah aktor penting dalam pasar keuangan, dan dengan demikian, masalah mereka membutuhkan perhatian dari pihak lain. Sebagian besar dari jasa dan produk keuangan yang ditujukan kepada konsumen adalah: rekening berjalan dan tabungan, pinjaman pribadi, kartu debit dan kredit, pinjaman hipotek, asuransi, pensiun dan tunjangan hari tua serta produk investasi. Secara umum, jenis-jenis transaksi adalah wilayah kekuasaan dari bank ritel dan perusahaan asuransi. Kurangnya perlindungan konsumen di sektor keuangan dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang buruk. Di antaranya, krisis keuangan itu sendiri dikarenakan kurangnya transparansi bank dalam kaitannya dengan pasar, dan juga pertumbuhan hutang dan hutang berlebihan dari nasabah lembaga keuangan. Untuk memastikan stabilitas keuangan dan praktik wajar lembaga keuangan, mereka harus mengintegrasikan perlindungan konsumen keuangan dengan kebijakan inklusi keuangan.



Inklusi Keuangan (Financial Inclusion)

Inklusi keuangan telah menjadi isu panas terkait dengan pertanyaan tentang kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan. Inklusi keuangan telah terlihat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, serta sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan, yang secara signifikan meningkat di seluruh dunia. Terdapat penumbuhan kesadaran bahwa pertumbuhan yang timpang memiliki batasan dan tidak berkelanjutan, karena permintaan agregat akan terbatas. Jika ketidaksetaraan sangat tidak dapat ditoleris, hal ini akan membawa sejumlah konsekuensi sosial, paling buruk, kerusuhan sosial, yang akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Inklusi keuangan adalah akses universal, dengan biaya yang wajar, untuk berbagai layanan keuangan. Meskipun demikian, definisi yang lebih luas dari inklusi keuangan juga menimbulkan beberapa risiko. Hal ini

karena bank, meskipun mereka bukan satu-satunya aktor lembaga keuangan untuk inklusi keuangan, di satu sisi mungkin ditekan oleh pemerintah negara mereka untuk menyediakan kredit mikro untuk usaha kecil dan orang miskin. Lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan untuk semua kelompok pendapatan di masyarakat.



Remunerasi (Remuneration)

Remunerasi bagi karyawan dalam suatu perusahaan umumnya terdiri dari bagian tetap – gaji dasar – dan bagian dengan variabel. Besarnya bagian variabel ini ditentukan dengan cara yang berbeda, misalnya dengan menghubungkan prestasi karyawan dengan (bagian dari) pencapaian finansial perusahaan. Dalam hal prestasi yang baik atau hasil keuangan yang baik, variabel remunerasi untuk karyawan dapat menjadi relatif tinggi dibandingkan dengan gaji pokok, tetapi sebaliknya juga bisa terjadi. Bagian variabel remunerasi sering disebut bonus, komisi, pembagian keuntungan, remunerasi kinerja, dsb. Dalam perangkat ini semua jenis variabel remunerasi disebut “bonus”. Kebijakan yang solid dari keseluruhan lembaga keuangan (termasuk seluruh anak perusahaan) mengenai remunerasi paling tidak menyangkut Dewan Direktur, Senior Manajemen dan para pengambil risiko. Pada penilaian tahun ini lembaga keuangan dinilai berdasarkan kebijakan bonus untuk ketiga kelompok tersebut. Adapun latar belakang tema ini dikembangkan ialah karena adanya *concern* tentang rasa keadilan masyarakat tentang industri keuangan, –dimana dalam konteks internasional, sementara lembaga keuangan meminta di- *bail out* oleh pemerintah dengan uang pajak rakyat, pembayaran bonus bagi para eksekutif dan spekulan juga tetap dibayarkan dengan sangat tinggi dan tidak rasional.



Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability*)

Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui apa konsekuensi kegiatan usaha terhadap hidupnya dan risiko yang dapat terjadi padanya akibat dari kegiatan tersebut. Orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi tidak dapat membela kepentingan mereka jika mereka tidak sepenuhnya mengetahui keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta biaya dan risiko yang terkait dengan kegiatan itu. Mereka juga harus diberitahu tentang kemungkinan alternatif kegiatan yang diusulkan. Dalam rangka untuk membela kepentingan sosial, budaya dan lingkungan mereka, organisasi sosial juga harus memiliki akses ke semua informasi yang relevan. Untuk alasan ini, hak publik atas informasi – dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam cara yang berarti dalam proses pengambilan keputusan – dicatat dalam berbagai instrumen internasional. Bagi lembaga keuangan yang menganggap tanggung jawab sosial sebagai hal yang serius, kebijakan transparansi dan akuntabilitas yang solid sangat penting. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai dari kebijakan internal operasional mereka

Sebagai dasar, ada beberapa kesepakatan internasional yang dirujuk dalam penyusunan perangkat ini, antara lain:

1. Prinsip-prinsip Ekuator (*The Equator Principles*)
2. Kode Etik Uni Eropa tentang Ekspor Senjata (*EU Code of Conduct for Arms Exports*)
3. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative/EITI*)
4. Panduan IFC tentang Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (*IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines*)
5. Standar Kinerja IFC (*IFC Performance Standards*)
6. Dewan Tambang dan Logam Internasional (*International Council on Mining and Metals/ICMM*)
7. Pedoman OECD tentang Penyelidikan atas Risiko dan Tingkat Kepercayaan terhadap Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggungjawab dari Wilayah Konflik dan Berisiko Tinggi (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*)
8. Panduan OECD tentang Perusahaan Multinasional (*OECD Guidelines for*

Multinational Enterprises)

9. Deklarasi Rio (*Rio Declaration*)
10. *UN Global Compact*
11. Prinsip-prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guiding Principles on Business & Human Rights*)
12. Standar Emas WWF (*WWF Gold Standard*)
13. Konvensi PBB tentang Hukum Kelautan (UNCLOS)
14. Kode Etik FAO tentang Perikanan Bertanggungjawab
15. Dan lain-lain

Walaupun terdapat pro dan kontra baik dari dunia bisnis maupun dalam kalangan masyarakat sipil sendiri terhadap standar-standar internasional ini, namun secara global, standar-standar inilah yang telah cukup banyak disepakati masyarakat internasional, sehingga bank-bank di Indonesia diharapkan tidak saja hanya mengacu pada regulasi dan kebijakan dari regulator industri keuangan dalam negeri, namun juga menjadi selangkah lebih maju dengan berusaha mengacu pada standar-standar yang relatif lebih 'tinggi'.

Selain itu, perangkat ini juga mengacu pada beberapa banyak prinsip dan kesepakatan internasional lainnya, seperti standar-standar industri tertentu dan keberlanjutan serta sertifikasi-sertifikasi yang telah banyak diterapkan di industri tertentu.

Adapun jenis pemberian pinjaman atau

investasi yang dianggap relevan dengan model scoring review kebijakan yang dimasukkan dalam penilaian ini adalah:

- Kredit korporasi (bukan kredit konsumsi dan hipotek pribadi)
- Pembiayaan Proyek (*project finance*)
- Investasi lembaga keuangan itu sendiri (pada neraca keuangan)
- Manajemen aset (mis. investasi untuk kepentingan klien)

Untuk setiap dokumen kebijakan peneliti melakukan verifikasi apakah kebijakan investasi yang dinilai berlaku untuk tiap kategori. Untuk setiap elemen penilaian yang ditemukan dalam dokumen kebijakan lembaga keuangan, skor dasar akan diberikan poin plus tambahan poin untuk setiap kategori kebijakan berlaku.

Karena metodologi ini lebih menasar pada kebijakan pemberian pinjaman dan investasi dari lembaga keuangan, lebih banyak elemen dinilai pada aspek ini, -walaupun unsur kebijakan operasional masih sedikit dipertimbangkan. Elemen-elemen dari kebijakan operasional disebut "*low hanging fruits*" - yaitu elemen-elemen yang relatif lebih mudah bagi lembaga keuangan untuk mendapatkan nilai, dalam metodologi ini.

Berikut ini adalah contoh bagaimana sebuah lembaga keuangan / bank dinilai dengan menggunakan metodologi ini, untuk tema perubahan iklim (jumlah elemen yang dinilai lebih banyak, tetapi yang ditampilkan di sini hanya beberapa contoh elemen).

3 HASIL PENILAIAN

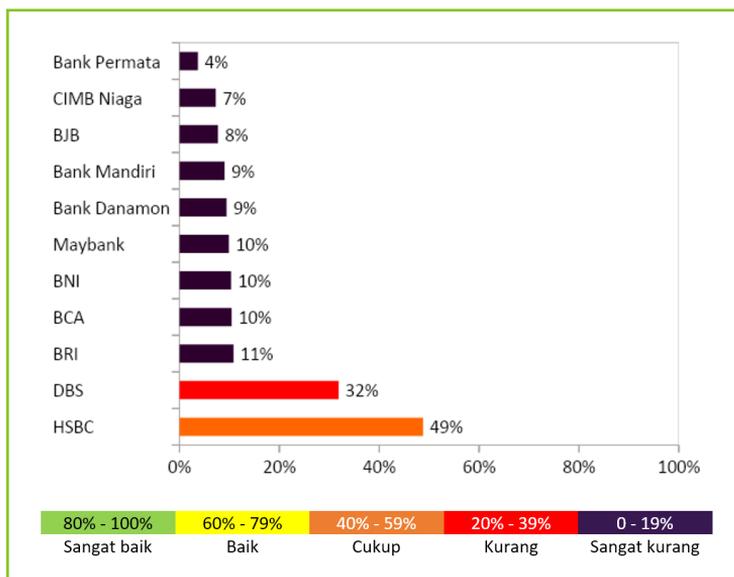


Peringkat Bank Secara Umum

Pada pemeringkatan bank tahun 2018, ResponsiBank Indonesia melakukan penilaian kebijakan kredit dan investasi pada sebelas bank yang beroperasi di Indonesia dengan 7 tema *cross cutting*, 7 tema sektoral dan 4 tema operasional. Perangkat penilaian ini adalah sarana bagi konsumen untuk menilai apakah bank/industri keuangan telah mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik dalam *core business* mereka, yaitu dalam kebijakan pemberian pinjaman dan atau investasi. Kebijakan yang dinilai bersumber dari dokumen yang dapat diakses publik.

Bank yang dinilai dipilih dari kategori Buku III dan Buku IV yang termasuk dalam bank nasional dan asing. Bank asing dinilai sebagai *benchmark* praktik pembiayaan dan pemberian kredit dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. Pada tahun 2018, bank asing yang dinilai adalah HSBC dan DBS. Sementara itu, bank nasional yang dinilai adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, BJB, BCA, Bank Danamon, Bank Permata, Maybank dan CIMB Niaga. Penilaian untuk Bank Permata, BJB, Maybank dan DBS baru pertama kali dilakukan pada tahun 2018 (*baseline study*).

Grafik 1. Nilai Konsolidasi dan Peringkat Bank Secara Umum



Secara umum, agregat nilai yang didapat oleh bank pelat merah maupun bank swasta nasional masih tergolong

rendah, hanya berkisar antara 4 hingga 10 persen dari nilai maksimal 100 persen. Padahal, dua bank asing, yakni DBS dan

HSBC masing-masing memperoleh nilai di atas 30 persen. HSBC menduduki peringkat pertama di antara 10 bank lain yang dinilai dengan agregat nilai 49 persen. Nilai ini diraih oleh HSBC mempublikasikan beberapa dokumen kebijakan pemberian kredit maupun pembiayaan pada sektor-sektor yang

sensitif seperti perkebunan dan ekstraktif. Hal ini yang menjadikan bank tersebut memperoleh nilai tinggi pada beberapa tema. Pada posisi kedua, menyusul DBS dengan agregat nilai 32 persen.

Bank nasional dengan perolehan nilai tertinggi adalah BRI dengan perolehan

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penilaian Bank per Tema dan Sektor (dalam persen)

Bank	Tema Cross-cutting							Tema Sektoral		
	Perubahan Iklim	Ko-rupsi	Kese-taraan Gender	Hak Asasi Manusia	Hak Pekerja	Keaneka-ragaman Hayati	Perpa-jakan	Per-sen-jataan	Pangan	
HSBC	43	50	30	58	54	40	47	31	50	
DBS	19	42	35	40	32	30	29	68	23	
Maybank	0	33	20	0	0	5	6	0	0	
Bank Mandiri	0	25	0	0	0	5	18	0	0	
BRI	0	42	20	0	0	0	0	0	0	
BNI	3	33	0	0	0	3	0	0	2	
BCA	0	33	0	0	0	5	0	17	0	
Bank Per-mata	0	33	0	0	0	0	0	0	0	
Bank Danamon	0	25	13	0	14	20	0	0	0	
BJB	0	25	13	0	0	0	0	0	0	
CIMB Niaga	0	33	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata	6	34	12	9	9	10	9	11	7	

Keterangan:

- Bank Asing
- Bank BUKU 3
- Bank BUKU 4

nilai 11 persen. Disusul BCA, BNI dan Maybank dengan perolehan nilai 10 persen. Sementara bank nasional lain, yakni Bank Mandiri dan Bank Danamon memperoleh nilai 9 persen. Bank Permata memperoleh nilai terendah, yakni 4 persen. CIMB Niaga memimpin di atasnya dengan perolehan nilai 7

persen. Di sisi lain, BJB sebagai salah satu bank daerah yang cukup pesat perkembangannya memperoleh nilai 8 persen. Hasil penilaian lengkap dari tiap bank per tema dan sektor dapat dilihat pada Tabel 1.

	Tema Sektorial					Tema Operasional				Rata-rata nilai
	Ke-hutan-an	Industri manufaktur	Pertambangan	Minyak dan gas	Pembangkit Listrik	Perlindungan Konsumen	Inklusi Keuangan	Remunerasi	Transparansi dan Akuntabilitas	
	69	63	69	65	65	62	12	29	41	49
	32	18	19	16	30	43	31	33	34	32
	0	6	0	0	0	43	42	0	23	10
	0	0	0	0	5	34	51	0	26	9
	0	4	0	0	5	33	53	0	38	11
	4	10	0	0	5	43	48	0	33	10
	0	0	0	0	5	60	40	7	21	10
	0	0	0	0	0	10	8	0	16	4
	0	0	0	0	0	19	42	5	31	9
	0	0	0	0	5	22	48	0	26	8
	0	0	0	0	0	33	39	0	25	7
	10	9	8	7	11	37	38	7	29	14

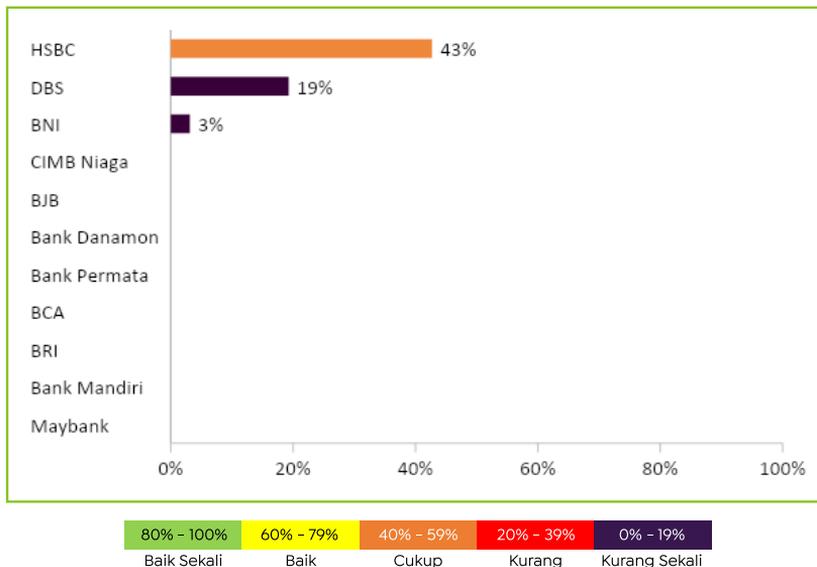
Penjelasan Perolehan Nilai Per Tema dan Sektor

Perubahan Iklim

Pada tema perubahan iklim, hanya tiga bank yang memperoleh nilai, yaitu HSBC, DBS dan BNI. Bank HSBC berada pada peringkat pertama dengan perolehan nilai 43 persen. HSBC cukup jelas dalam mengungkapkan kebijakan pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan maupun kebijakan internal terkait peran HSBC dalam mengurangi dampak perubahan iklim. HSBC juga telah berkomitmen untuk

masuk dalam kesepakatan internasional, yakni *Equator Principles*. Pada laporan tahunannya, HSBC berkomitmen untuk menghentikan pembiayaan baru proyek investasi pada pembangkit listrik tenaga uap yang bersumber dari batubara maupun penambangan panas bumi. Bank ini juga memiliki komitmen penurunan emisi karbon dengan target yang jelas dan terukur pada kegiatan operasional karyawan.

Grafik 2. Peringkat Bank pada Tema Perubahan Iklim



DBS berada pada peringkat kedua dengan perolehan nilai 19 persen. Sama halnya dengan HSBC, bank ini juga berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi jejak karbon dalam kegiatan

operasionalnya. Pada tahun 2017, DBS berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 5000 ton dibandingkan pada tahun awal, yakni 2014. DBS pun berkomitmen untuk meningkatkan portofolio pembiayaan energi

terbarukan, menghentikan pembiayaan untuk penambangan batubara termal baru (*greenfield*) maupun pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

BNI adalah satu-satunya bank nasional yang memperoleh nilai pada tema perubahan iklim, yakni sebesar 3 persen. BNI telah berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip berkelanjutan di level keputusan dan perumusan kebijakan dan sudah secara aktif menyalurkan pembiayaan

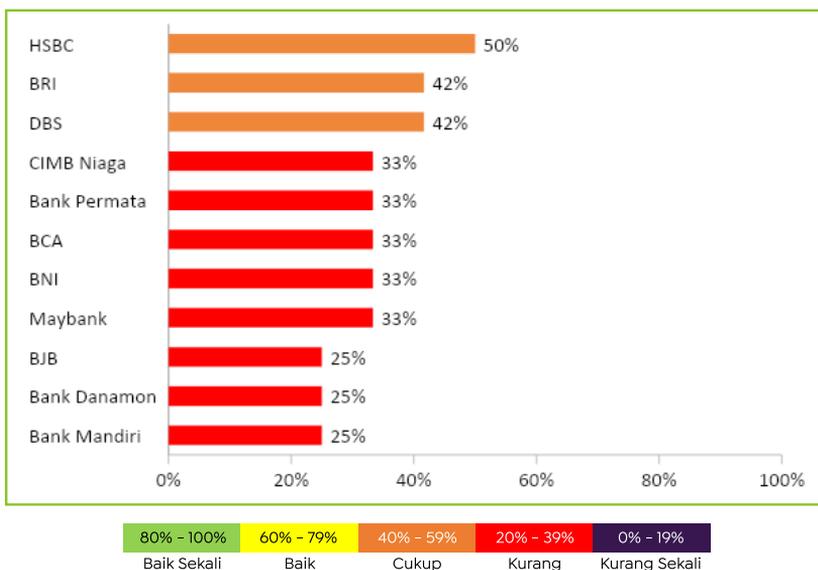
ke proyek berwawasan lingkungan melalui skema segmen korporasi. Dukungan pembangunan proyek energi terbarukan juga dilakukan BNI melalui kerjasama debitur dan lembaga pembiayaan sebagai agen jaminan dan penampungan. Beberapa proyek yang telah disasar oleh BNI antara lain bangunan berwawasan lingkungan (*green building*), pembangunan pembangkit listrik, air, geothermal dan mini hidro, serta perusahaan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan ISPO.

Korupsi

Pada tema korupsi, nilai bank berkisar antara 25 hingga 50 persen. Peringkat teratas pada tema ini adalah HSBC dengan nilai 50 persen yang masuk pada kategori cukup. HSBC memiliki kebijakan yang jelas untuk mengantisipasi tindakan korupsi. Kebijakan tersebut diantaranya terkait Anti Pencucian Uang

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) hingga risiko kejahatan uang. HSBC juga mempublikasikan kuisisioner *Wolfsberg Group Anti-Money Laundering*, sebagai komitmennya dalam mencegah tindakan pencucian uang dan pembiayaan teroris.

Grafik 3. Peringkat Bank pada Tema Korupsi



BRI dan DBS berada pada posisi kedua dan ketiga dengan nilai sama, yakni 42 persen. BRI dalam Laporan Tata Kelola yang Baik 2017 menyatakan komitmennya terkait tindakan suap atau tindakan serupa lain, baik dari nasabah, hingga pihak ketiga. Bank ini juga dengan jelas menyatakan implementasi kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sama halnya dengan DBS yang juga secara jelas menyampaikan informasi terkait kebijakan manajemen untuk mengurangi tindakan pencucian uang dan pembiayaan kegiatan terorisme. DBS juga menyampaikan untuk memitigasi risiko tersebut, serangkaian kebijakan diimplementasikan dengan dilengkapi kemampuan penasihat, pelatihan, pengawasan hingga pengujian.

Beberapa bank seperti CIMB Niaga, Bank Permata, BCA, BNI, dan Maybank berada di lini tengah pemeringkatan dengan tema korupsi. Nilai bank-bank tersebut mencapai 33 persen. Bank-

bank tersebut sebagian besar sudah mengimplementasikan kebijakan APU-PPT. Pada kebijakan bisnis yang berkaitan dengan seseorang yang terpandang secara politik/*Politically Exposed Person* (PEP), BNI melakukan penyesuaian kebijakan anti pencucian uang yang mengacu pada Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK.

Pada peringkat akhir terdapat BJB, Bank Danamon dan Bank Mandiri dengan perolehan nilai 25 persen. Beberapa bank tersebut juga telah mengimplementasikan kebijakan APU-PPT. Dalam Laporan Tahunan Bank Danamon menyatakan tidak akan mendanai kegiatan berbasis politik, akan tetapi pada kebijakan APU-PPT belum mengatur adanya pencegahan lebih lanjut ketika bersinggungan dengan pembiayaan bisnis yang menyangkut PEP. Sementara pada Bank Mandiri maupun BJB tidak terdapat informasi terkait kebijakan tersebut.

Kesetaraan Gender

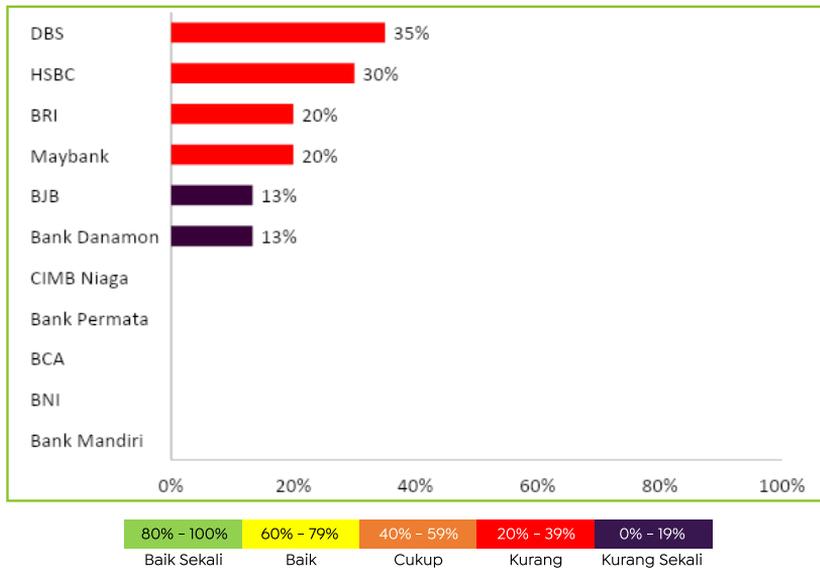
Pada tema kesetaraan gender hanya enam bank yang memperoleh nilai yaitu DBS, HSBC, BRI, Maybank, BJB dan Bank Danamon. Nilai yang diperoleh bank pada tema ini masih tergolong rendah yakni berkisar antara 13 persen hingga 35 persen. Hal ini karena kebijakan kesetaraan gender yang dimiliki oleh bank-bank tersebut tidak secara rinci mengatur pada kebijakan investasi dan pemberian kredit meskipun sudah mengatur pada internal perusahaan.

DBS menduduki peringkat teratas dengan perolehan nilai sebesar 35 persen. Pada kebijakan internalnya, DBS berkomitmen tidak mentolerir diskriminasi gender dalam bentuk apapun, baik untuk karyawan maupun konsumen. Selain itu, DBS juga menerapkan kebijakan pembayaran gaji yang setara. Kesenjangan upah antar-gender di DBS tercatat hanya sebesar 1 persen pada 2017. Terkait kepemimpinan perempuan, DBS memberikan porsi

yang sama baik perempuan dan laki-laki yang mana lebih dari sepertiga posisi manajemen senior DBS diduduki oleh perempuan. Meskipun DBS telah mengadopsi standar internasional

seperti *IFC Performance Standard*, bank ini tidak secara rinci mengatur bagaimana perusahaan yang dibiayainya perlu menerapkan kesetaraan gender dalam kegiatan operasionalnya.

Grafik 4. Peringkat Bank pada Tema Kesetaraan Gender



HSBC menduduki peringkat kedua setelah DBS dengan peroleh nilai sebesar 30 persen. Kebijakan internal HSBC sudah secara jelas mengatur bagaimana keadilan dalam pembayaran gaji tanpa membedakan jenis kelamin, hingga partisipasi perempuan pada level manajemen senior. HSBC menargetkan 30 persen posisi manajemen senior diduduki oleh perempuan pada 2020.

Sementara itu, BRI dan Maybank berada pada peringkat ketiga dan keempat dengan perolehan nilai 20 persen. BRI sebagai salah satu bank nasional cukup progresif dalam pengaturan

kebijakan anti diskriminasi dan kebijakan remunerasi dan benefit. Kebijakan tersebut mengatur bagaimana karyawan dan konsumen diperlakukan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, maupun ras. Selain itu dalam hal remunerasi dan benefit, BRI juga menjelaskan bagaimana menerapkan pemberian gaji yang adil dan setara. Lebih jauh, Maybank melakukan kebijakan yang cukup progresif dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya melalui program *Woman Council*. Pada level manajemen senior, partisipasi perempuan di Maybank

mencapai 36,5 persen.

BJB dan Bank Danamon pada posisi setelah BRI dan Maybank dengan perolehan nilai 13 persen. BJB maupun Danamon menyatakan pembayaran gaji yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. BJB juga memberikan

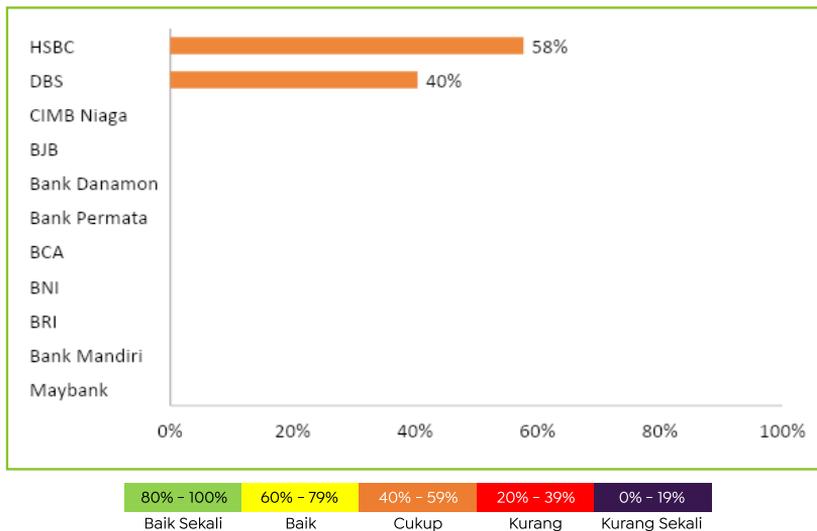
seluruh stafnya baik laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan kompetensi dan keahliannya pada semua jenjang. Akan tetapi, partisipasi perempuan di BJB pada level manajemen senior pada bank ini masih rendah, yakni 7,16 persen.

Hak Asasi Manusia

Pada tema hak asasi manusia, hanya dua bank yang memperoleh nilai, yaitu HSBC dan DBS dengan besaran nilai masing-masing 58 persen dan 40 persen. HSBC telah mengadopsi standar internasional terkait penghargaan pada hak asasi manusia, seperti *Equator Principles*, *IFC Performance Standard*, *UN Global Compact* dan *UN Principles for Responsible Investment*. Bank ini menyatakan secara eksplisit dalam penghargaannya kepada hak asasi

manusia baik dalam kebijakan internal maupun kebijakan pembiayaan atau investasi. HSBC mensyaratkan para debitur yang mereka berikan kredit untuk tidak melanggar hak masyarakat lokal terkait penggunaan lahan yang terdampak atas proyek yang didanai. Selain itu, HSBC juga menyatakan perusahaan yang mereka danai untuk menghargai hak-hak perempuan dan anak.

Grafik 5. Peringkat Bank pada Tema Hak Asasi Manusia



Seperti halnya HSBC, bank DBS juga telah mengadopsi standar internasional terkait praktik bisnis yang menghargai hak asasi manusia. DBS mengadopsi *IFC Performance Standard*, khususnya dalam hal pembiayaan proyek pembangkit listrik batu bara. DBS berkomitmen

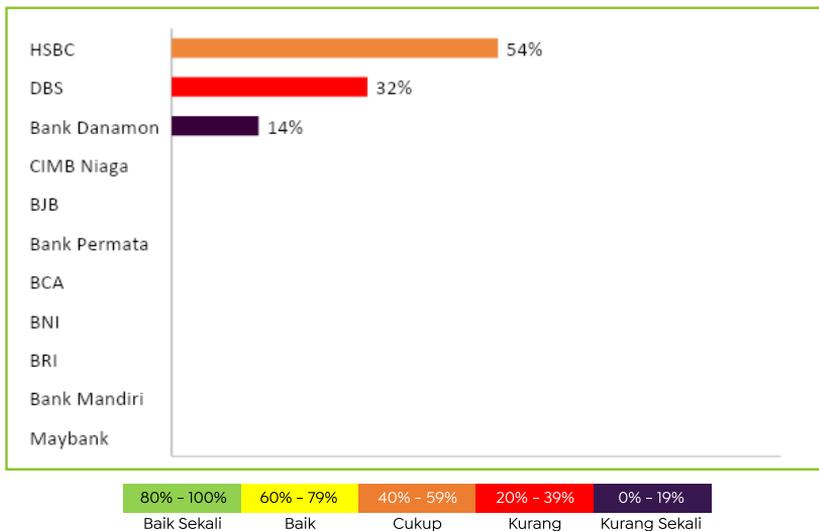
tidak akan membiayai proyek yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelibatan buruh paksa maupun buruh anak dan melanggar hak masyarakat lokal yang terdampak proyek.

Hak-hak Pekerja

Hanya tiga bank yang memperoleh nilai pada tema hak-hak pekerja, yaitu HSBC, DBS dan Bank Danamon. Peringkat pertama dan kedua diduduki oleh bank asing, yakni HSBC dengan nilai 54 persen dan DBS dengan nilai 32 persen. HSBC secara jelas menyatakan bahwa lembaga keuangan tersebut menghargai deklarasi ILO terkait prinsip dan hak mendasar di lingkungan kerja sebagai komitmennya untuk menghargai hak-hak pekerja. Lembaga keuangan ini

juga menyatakan telah mengadopsi *Equator Principles* yang menyatakan tidak akan membiayai proyek ataupun perusahaan yang melanggar hak-hak pekerja seperti menggunakan pekerja paksa hingga buruh anak-anak. Lebih lanjut, DBS memperoleh nilai pada beberapa elemen sebagai salah satu bank yang berkomitmen dalam mengadopsi standar internasional, yakni *IFC Performance Standard*.

Grifik 6. Peringkat Bank pada Tema Hak-Hak Pekerja



Hanya bank Danamon sebagai bank nasional yang memperoleh nilai pada tema ini yakni sebesar 14 persen, sedangkan kedelapan bank lainnya tidak memperoleh nilai sama sekali karena tidak ditemukan informasi spesifik sesuai elemen penilaian dari dokumen

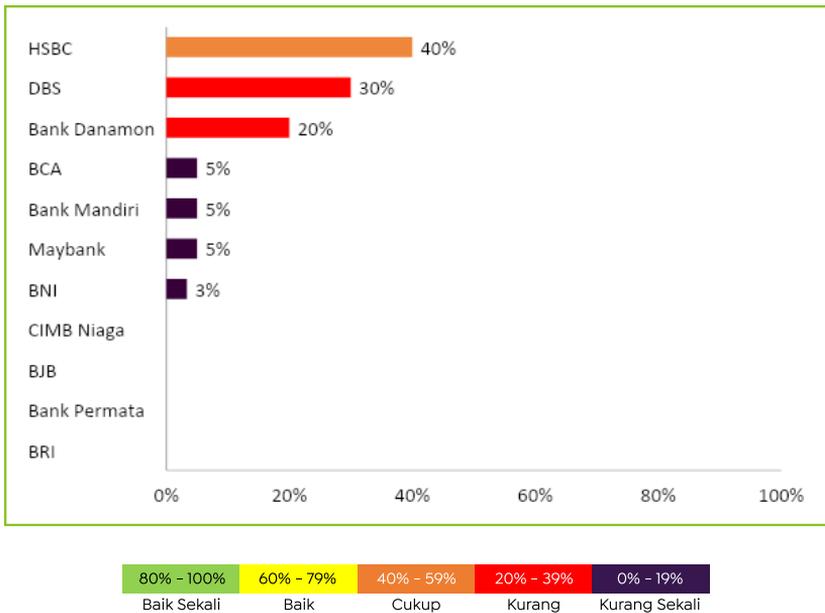
yang dipublikasikan oleh bank. Bank Danamon menyatakan dalam Laporan Berkelanjutan tahun 2015 tentang kebijakan pemberian kredit bank untuk industri-industri yang dilarang, salah satunya yang melibatkan buruh anak-anak, kerja eksploitatif dan paksa.

Keanekaragaman Hayati

HSBC memperoleh nilai tertinggi pada tema keanekaragaman hayati, yakni 40 persen. HSBC memiliki beberapa kebijakan sebagai komitmennya untuk menjaga keanekaragaman hayati. Kebijakan tersebut terkait pembiayaan pada komoditas pertanian, khususnya kelapa sawit. Selain itu, terdapat kebijakan

terkait situs warisan dunia dan lahan basah Ramsar sebagai respon pembiayaan kredit pada sektor-sektor yang berisiko pada kerusakan lingkungan. Dalam kebijakan tersebut, HSBC berkomitmen tidak akan menyalurkan kredit ke proyek dan perusahaan yang terlibat langsung dalam proses deforestasi.

Grafik 7. Peringkat Bank pada Tema Keanekaragaman Hayati



DBS menduduki peringkat kedua pada tema keanekaragaman hayati

dengan perolehan nilai 30 persen. Hal ini karena DBS telah mempublikasikan

kebijakan terkait pembiayaan yang bertanggung jawab. Dalam kebijakan pembiayaan kelapa sawit, DBS telah berkomitmen untuk tidak menyediakan layanan jasa keuangan pada perusahaan yang terlibat pada konversi hutan bercadangan karbon tinggi, penanaman di lahan gambut, dan penanaman yang melanggar hak masyarakat lokal.

Urutan berikutnya disusul oleh bank nasional yakni Danamon dengan perolehan nilai 20 persen. Danamon dalam laporan berkelanjutannya tahun 2015 menyatakan bahwa kebijakan kredit bank mengelola beberapa industri terlarang, seperti perjudian, perdagangan spesies langka, industri yang membahayakan lingkungan atau memiliki riwayat membahayakan lingkungan, dan industri yang melibatkan bentuk-bentuk eksploitatif kerja paksa dan buruh anak. Danamon juga berkomitmen untuk tidak menyalurkan kredit ke proyek yang berlokasi di area sensitif seperti kawasan lindung dan

budidaya.

Bank nasional lain seperti BCA, Mandiri dan Maybank memperoleh nilai 5 persen pada tema ini. Ketiga bank tersebut menyatakan dalam analisis kreditnya mengharuskan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi para debitur yang berisiko tinggi pada kerusakan lingkungan. BNI menduduki peringkat terakhir pada tema ini dengan perolehan nilai 3 persen. BNI memperoleh nilai atas kebijakannya terkait debitur yang beroperasi pada industri air minum kemasan yang diharuskan untuk memiliki Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA). Sementara itu, keempat bank lainnya, yakni CIMB Niaga, BJB, Bank Permata dan BRI tidak memperoleh nilai sama sekali. Hal ini karena tidak ditemukan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan tentang bagaimana kebijakan bank-bank tersebut memberikan pembiayaan atau kredit pada sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Perpajakan

Pada tema perpajakan, hanya empat bank yang memperoleh nilai, yakni HSBC, DBS, Bank Mandiri, dan Maybank. Sebagian besar nilai yang diperoleh masih tergolong rendah karena kebijakan perpajakan yang dimiliki bank-bank tersebut tidak secara rinci mengatur pada kebijakan investasi dan pemberian kredit meskipun sudah mengatur pada internal perusahaan.

HSBC menduduki peringkat pertama

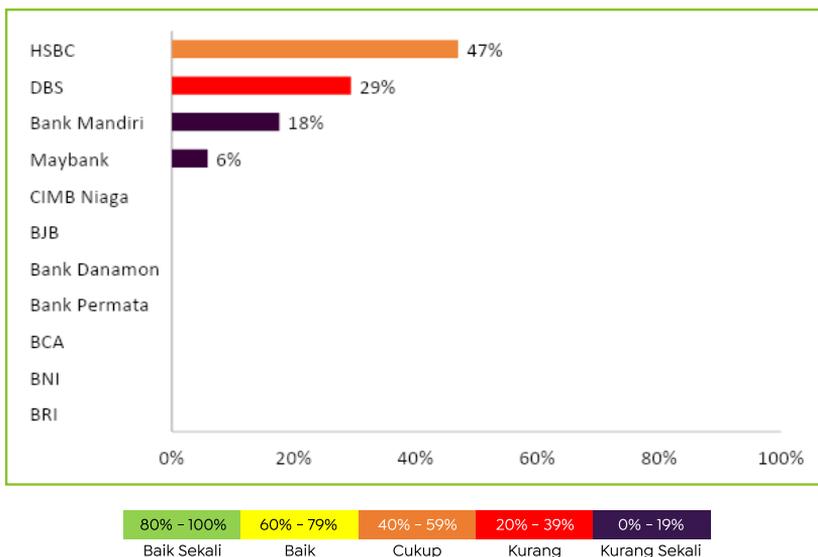
dengan perolehan nilai 47 persen. HSBC secara jelas memberikan informasi penerimaan, laba, maupun pembayaran pajak pada semua wilayah dimana HSBC beroperasi. Bank ini juga memastikan bahwa dalam proses bisnisnya tidak berhubungan dengan upaya penghindaran pajak. HSBC terus melaksanakan inisiatif global untuk meningkatkan transparansi pajak, seperti *US Foreign Account Tax*

Compliance Act (FACTA), OECD Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan lain lain. Urutan kedua disusul oleh DBS dengan perolehan nilai sebesar 29 persen. Peroleh nilai tersebut karena DBS telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan pajak yang bertanggung jawab dalam kerangka *transfer pricing*.

Mandiri menempati urutan ketiga dengan perolehan nilai 18 persen. Sama halnya dengan HSBC, Mandiri secara jelas memberikan informasi penerimaan, laba, total aset maupun pembayaran pajak pada wilayah di mana Mandiri beroperasi antara lain Indonesia, Asia, Eropa Barat dan Kepulauan Cayman.

Maybank menduduki urutan terakhir dengan perolehan nilai 6 persen. Pada kebijakan internalnya, Maybank telah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Peraturan tersebut khususnya mengatur pelaporan nasabah asing untuk keperluan perpajakan. Bank lain tidak memperoleh nilai sama sekali. Hal ini karena tidak ditemukan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan terkait kebijakan internal dan kebijakan bank-bank tersebut dalam memberikan pembiayaan atau kredit berdasarkan kepatuhan wajib pajak.

Grafik 8. Peringkat Bank pada Tema Perpajakan

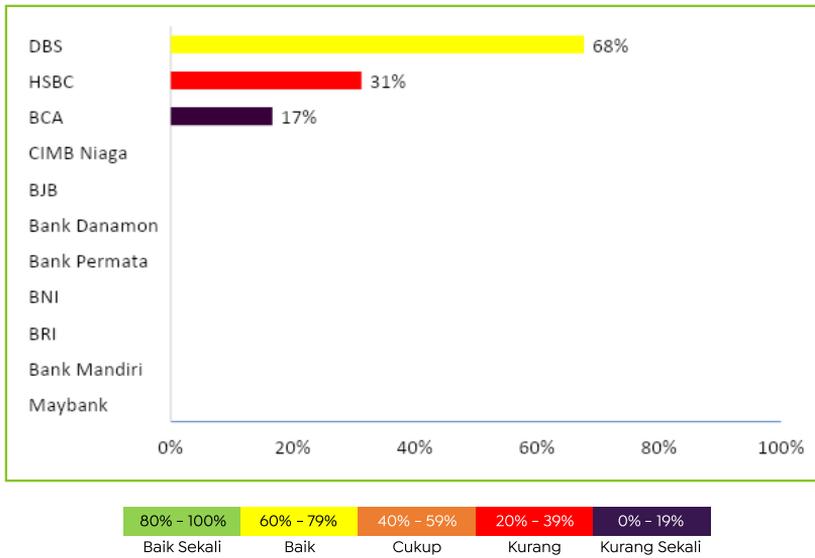


Persenjataan

Pada tema persenjataan hanya tiga bank yang memperoleh nilai, yakni DBS, HSBC dan BCA. Peringkat pertama diduduki oleh DBS dengan perolehan nilai 68 persen. DBS menyebutkan bahwa pembiayaan pada sektor produksi senjata, maupun produk dan jasa pendukung produksi senjata merupakan sektor yang tidak akan dibiayai dalam kebijakan kerangka *green bond*. Selain hal tersebut, DBS juga menyatakan tidak akan membiayai sektor yang bergerak pada teknologi nuklir. Urutan kedua disusul oleh HSBC dengan perolehan nilai 31 persen. Sama halnya dengan DBS, HSBC telah memiliki kebijakan yang secara cukup jelas mengatur penyaluran kredit dan investasi pada sektor persenjataan, yakni kebijakan tentang industri kimiawi dan kebijakan sektor peralatan pertahanan. HSBC berkomitmen untuk tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada industri yang bergerak pada produksi ranjau, bom curah maupun senjata kimia. BCA merupakan satu-satunya bank nasional yang memperoleh nilai pada tema ini. BCA menempati peringkat terakhir dengan perolehan nilai 17 persen. Meskipun BCA belum memiliki kebijakan spesifik terkait pembiayaan di sektor persenjataan, pada kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah menyatakan komitmennya untuk tidak mendanai industri di sektor persenjataan. Pada tahun 2017, BCA menyatakan telah memfilter nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi

Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang. Bank nasional besar milik pemerintah bisa dikatakan aktif dalam sektor persenjataan, terutama karena mereka ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan untuk industri pertahanan dan persenjataan nasional. Namun demikian, tidak ditemukan adanya kebijakan khusus yang mengatur pembiayaan persenjataan yang lebih bertanggung jawab sehingga bank nasional pemerintah lain tidak memperoleh nilai.

Grafik 9. Peringkat Bank pada Tema Persenjataan

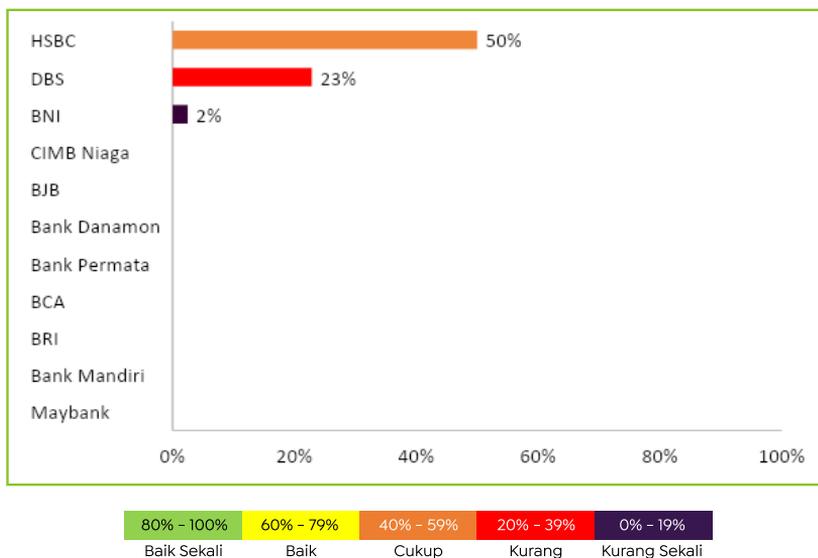


Pangan

Pada tema pangan, hanya tiga bank yang memperoleh nilai, yakni HSBC, DBS dan BNI. Peringkat pertama dan kedua diduduki oleh bank asing, yakni HSBC dengan perolehan nilai 50 persen dan DBS dengan perolehan nilai 23 persen. HSBC sebagai bank dengan perolehan nilai tertinggi memiliki kebijakan yang mengatur pembiayaan pada sektor komoditas pertanian, industri kimiawi, maupun sektor energi. Dalam membiayai industri yang bergerak di sektor pangan, HSBC menyatakan tidak akan memberikan kredit pada perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak pekerja dan masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu, HSBC juga tidak akan membiayai perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran kerusakan lingkungan, seperti merusak kawasan dengan nilai

konservasi tinggi, konversi hutan dengan cadangan karbon tinggi maupun menimbulkan polusi udara dan air. Sama halnya dengan HSBC, DBS berkomitmen tidak akan memberikan kredit pada perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak pekerja, masyarakat lokal maupun kerusakan lingkungan dalam membiayai industri yang bergerak di sektor pangan. BNI menduduki peringkat terakhir dengan perolehan nilai 2 persen. BNI menyebutkan bahwa dalam hal penyaluran kredit, perusahaan pangan yang dibiayai BNI telah memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, bank-bank lain tidak memperoleh nilai karena tidak didapatkan informasi spesifik terkait kebijakan pembiayaan di sektor pangan pada dokumen yang dipublikasikan.

Grafik 10. Peringkat Bank pada Sektor Pangan



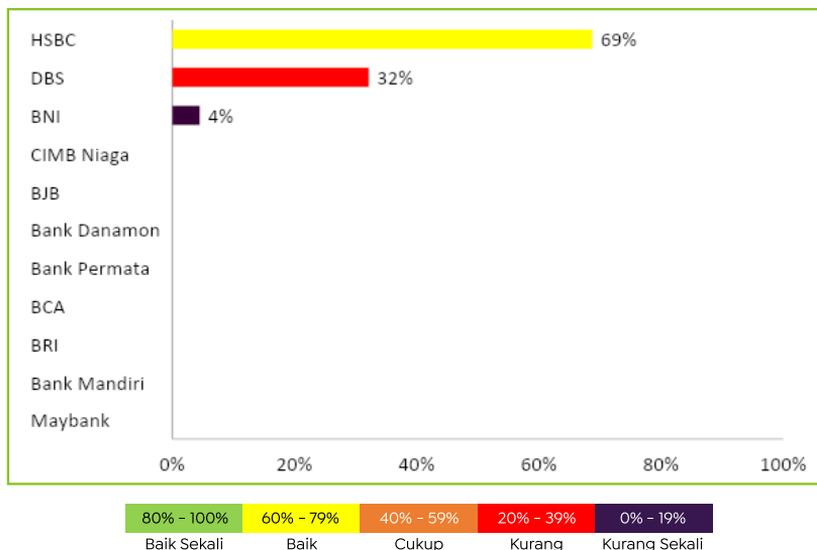
Kehutanan

Pada tema kehutanan, hanya tiga bank yang memperoleh nilai yakni HSBC, DBS dan BNI. Peringkat pertama dan kedua diduduki oleh bank internasional yaitu HSBC dengan perolehan nilai 69 persen dan HSBC dengan perolehan nilai 32 persen. HSBC memperoleh nilai yang baik pada tema ini karena telah memiliki kebijakan khusus untuk sektor kehutanan yaitu HSBC *Forestry Policy*. HSBC tidak akan memberikan menyalurkan kredit kepada perusahaan dan proyek yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam rantai pasok pembalakan liar, penebangan kayu dengan kekerasan dan melanggar hak-hak masyarakat tradisional, penebangan kayu di hutan dengan nilai konservasi tinggi yang terancam oleh industri ataupun konversi lahan non-hutan. Sama halnya, DBS juga telah berkomitmen dalam kebijakan

pembiayaan yang bertanggung jawab. DBS hanya akan memberikan kredit kepada debitur yang berkomitmen pada kebijakan tanpa deforestasi, gambut dan eksploitasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, namun hanya terdapat satu bank nasional yang secara khusus memiliki kebijakan sektoral yang dipublikasikan untuk sektor kehutanan yakni BNI. BNI menduduki peringkat terakhir dengan perolehan nilai 4 persen. Perolehan nilai tersebut karena BNI mengharuskan debitur yang bergerak di sektor industri furnitur untuk wajib memiliki Sistem Verifikasi Legal Kayu (SVLK). SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya berasal dari sumber yang asal usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas.

Grafik 11. Peringkat Bank pada Sektor Kehutanan



Industri Manufaktur

Hampir separuh bank yang dinilai memperoleh nilai pada tema industri manufaktur. Bank yang memperoleh nilai pada tema ini antara lain HSBC, DBS, BNI, Maybank dan BRI. Peringkat pertama diduduki oleh HSBC dengan perolehan nilai 63 persen. Perolehan nilai tersebut karena HSBC telah memiliki kebijakan pembiayaan yang dikhususkan bagi debitur yang bergerak di sektor industri kimia. Dalam dokumen *Chemicals Industry Policy*, HSBC melakukan uji kelayakan tambahan dan mencari izin risiko keberlanjutan yang tepat untuk nasabah yang: 1) diketahui telah melanggar peraturan material keamanan bahan kimia nasional atau internasional, 2) dengan riwayat pernah menyebabkan tumpahan bahan kimia yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. HSBC juga

mengimplementasikan standar internasional, yakni *IFC Performance Standard* dalam praktik pemberian kredit untuk debitur yang bergerak di sektor industri manufaktur.

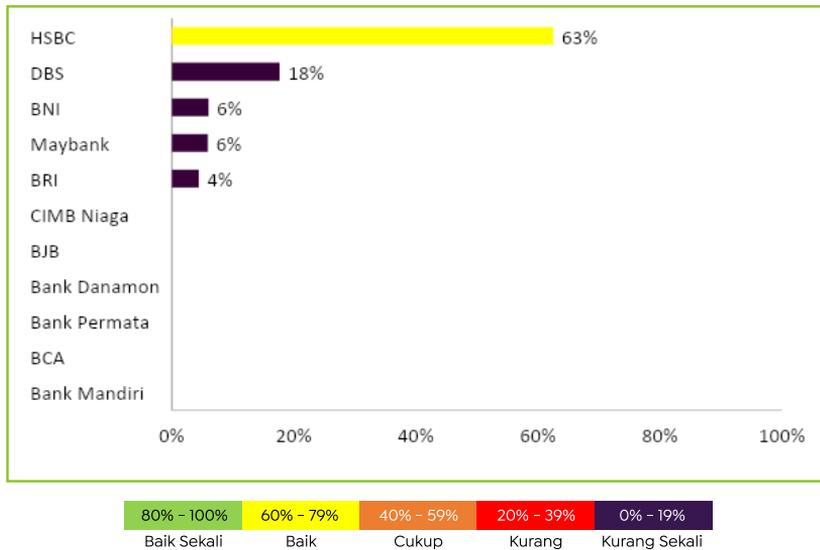
DBS menduduki peringkat kedua dengan perolehan nilai 18 persen. Sama halnya dengan HSBC, perolehan nilai tersebut karena DBS telah mengimplementasikan *IFC Performance Standard*. Sementara itu peringkat ketiga diduduki oleh BNI dan Maybank dengan perolehan nilai yang sama yakni sebesar 6 persen. Nilai ini diperoleh karena BNI dan Maybank sama-sama telah memiliki inisiatif kebijakan yang mengatur debitur untuk lebih ramah lingkungan.

Sedangkan, BRI menduduki peringkat terakhir dengan perolehan nilai 4 persen.

Keenam bank lainnya tidak memperoleh nilai. Hal ini karena tidak ditemukan informasi spesifik terkait kebijakan bank

dalam mengatur pembiayaan debitur yang bergerak pada sektor industri manufaktur.

Grafik 12. Peringkat Bank pada Sektor Industri Manufaktur



Pertambangan

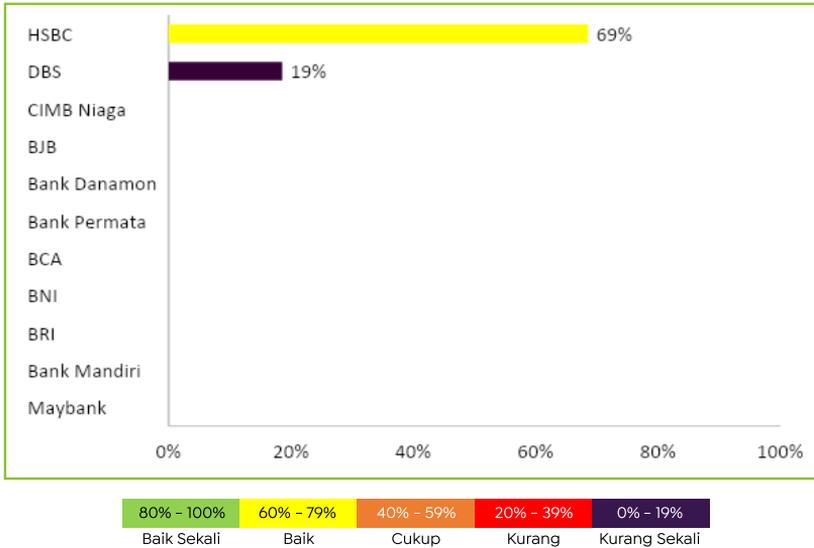
Hanya dua bank yang mendapatkan nilai pada tema pertambangan, yakni HSBC dan DBS. HSBC memimpin dengan perolehan nilai 69 persen, disusul oleh DBS dengan perolehan nilai 19 persen. Dalam dokumen kebijakan *HSBC Mining & Metals Sector Policy*, HSBC menghentikan pembiayaan untuk penambangan batu bara termal baru maupun pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Hal ini sebagai komitmen untuk mengurangi paparan terhadap batu bara yang berdampak pada lingkungan. Pada dokumen kebijakan tersebut, HSBC memberikan batasan penyaluran pembiayaan ke debitur dengan kondisi seperti: 1) terlibat

dalam pembangunan pertambangan batu bara baru, 2) membuang residu tambang di sungai atau air laut dangkal, 3) menggunakan sianida untuk memisahkan emas dari bijihnya, 4) menyebabkan dampak buruk pada hak asasi manusia, 5) memiliki rekam jejak buruk perihal keberlanjutan. Sementara itu HSBC melarang sepenuhnya penyaluran pembiayaan ke: 1) tambang batubara termal baru atau debitur yang bergantung pada tambang batubara baru, 2) penambangan dengan metode *Mountaintop Removal (MTR)* atau debitur yang bergantung pada MTR, 3) terlibat dalam pembuangan residue tambang di sungai atau air laut dangkal.

Pada dokumen kebijakan *Health and Safety Policy*, HSBC menyatakan bahwa debitur yang dibiayai harus memiliki

kebijakan dan bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan pekerja.

Grafik 13. Peringkat Bank pada Sektor Pertambangan



Sementara itu, DBS dalam dokumen kebijakan pembiayaan bertanggung jawab menyatakan untuk menghentikan pembiayaan pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada penambangan batubara termal, DBS berkomitmen untuk: 1) menghentikan pembiayaan proyek tambang batu bara termal

baru (*greenfield*), 2) hanya mendukung nasabah dengan strategi diversifikasi pada dasar pembiayaan perusahaan, dan 3) mengevaluasi strategi diversifikasi konsumen sebelum berkomitmen untuk akuisisi keuangan pada proyek tambang batubara termal.

Minyak Bumi dan Gas

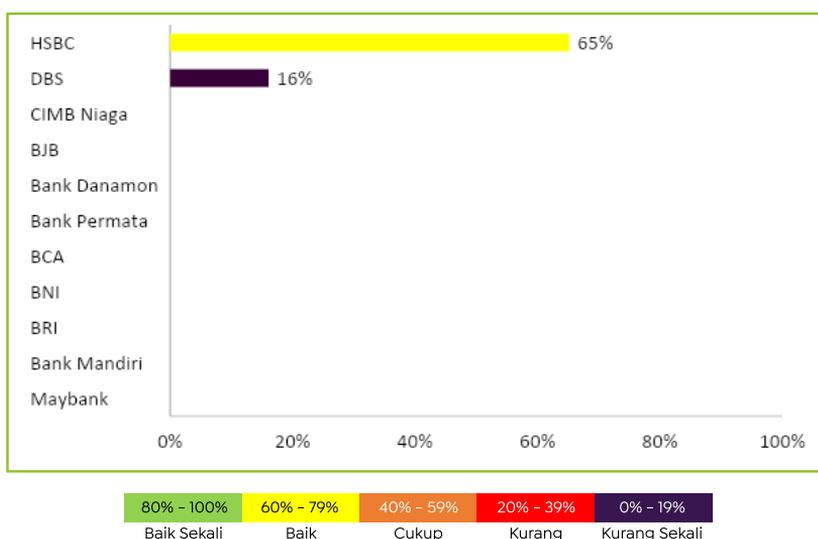
Pada tema minyak bumi dan gas, terdapat dua bank yang memperoleh nilai, yakni HSBC dan DBS. Peringkat pertama diduduki oleh HSBC dengan perolehan nilai 65 persen disusul DBS dengan perolehan nilai 16 persen. Kebijakan HSBC untuk debitur di sektor minyak bumi dan gas tergolong baik.

Berdasarkan dokumen kebijakan energi, HSBC melakukan penilaian uji kelayakan tambahan untuk : 1) Proyek minyak dan gas baru di mana perusahaan tidak memiliki komitmen untuk mengurangi atau menghilangkan emisi gas metana dalam produksi minyak atau gas atau melakukan pembakaran gas secara

rutin dalam produksi minyak dan 2) Proyek gas serpih baru di mana tidak ada konfirmasi tentang keselamatan operasi pengeboran (integritas sumur) atau pemantauan aktivitas seismik. Uji kelayakan tersebut diantaranya adalah untuk memahami bagaimana dampak proyek pada lingkungan, memastikan apakah operasi pengeboran memenuhi

standar keamanan, maupun memastikan terdapat pengurangan emisi gas metan pada produksi minyak dan gas. Lebih jauh, HSBC menyebutkan tidak akan memberikan pembiayaan atau kredit yang digunakan untuk proyek pasir minyak baru (*greenfield*) dan proyek minyak atau gas lepas pantai baru di kawasan Arktik.

Grafik 14. Peringkat Bank pada Sektor Minyak dan Gas



DBS memperoleh nilai pada beberapa elemen tema minyak dan gas atas komitmen yang tertuang dalam kebijakan pembiayaan bertanggung jawab. Khususnya pada sektor minyak dan gas, DBS tidak akan dengan sengaja membiayai kegiatan atau proyek yang melanggar undang-undang yang berlaku. Peraturan tersebut seperti proyek tidak boleh mempengaruhi situs warisan dunia UNESCO, ataupun eksplorasi gas tanpa memperhatikan pengelolaan kebocoran gas metan. Selain itu, DBS juga mengadopsi standar

internasional, yaitu *IFC Performance Standard*. Kesembilan bank lainnya tidak memperoleh nilai karena tidak terdapat informasi spesifik terkait kebijakan di sektor minyak bumi dan gas pada dokumen yang dipublikasikan.

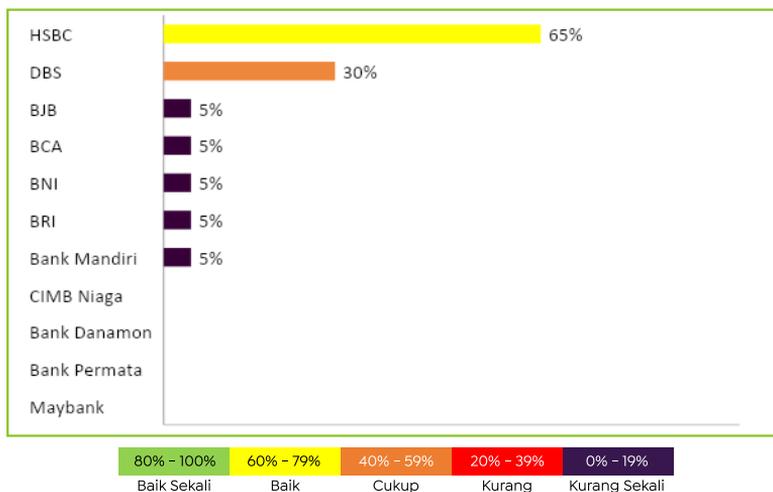
Pembangkit Listrik

Lebih dari separuh bank yang dinilai memperoleh nilai pada tema pembangkit listrik. HSBC menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 65 persen. Perolehan nilai tersebut adalah dikarenakan HSBC telah memiliki kebijakan sektor pembangkit listrik yang baik. Pada kebijakan internalnya, HSBC telah memiliki target yang terukur untuk meningkatkan pembiayaan pembangkit listrik yang terbarukan maupun pengurangan pembiayaan pada pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. HSBC juga berkomitmen untuk tidak lagi memberikan pembiayaan pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga uap (batubara), energi nuklir, tenaga air skala besar.

DBS menduduki peringkat kedua dengan perolehan nilai 30 persen. Sama halnya dengan HSBC, DBS telah berkomitmen untuk tidak membiayai proyek pembangkit listrik tenaga uap

baru terutama di negara anggota OECD dan pasar negara-negara maju. Peringkat selanjutnya diduduki oleh BJB, BCA, BNI dan BRI dengan perolehan nilai yang sama yaitu 5 persen. BJB memperoleh nilai tersebut karena telah mengimplementasikan komitmen pembiayaan yang bertanggung jawab dengan mendukung proyek hijau seperti bangunan hijau, pengelolaan limbah publik, pasokan air, dan efisiensi energi. Sementara itu BCA memperoleh nilai karena dukungannya terhadap pembiayaan energi terbarukan, efisiensi energi dan sektor pertanian organik. Selain proyek hijau tersebut, BRI juga menyalurkan pembiayaan ke sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata yang berkelanjutan. Keempat bank lainnya tidak memperoleh nilai karena ketiadaan informasi spesifik terkait kebijakan pembiayaan sektor pembangkit listrik pada dokumen yang dipublikasikan.

Grifik 15. Peringkat Bank pada Sektor Pembangkit Listrik

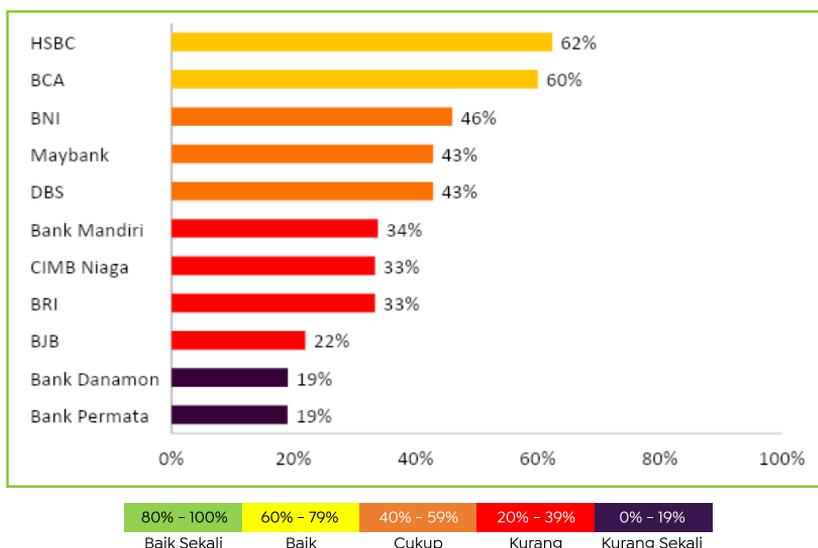


Perlindungan Konsumen

Pada tema perlindungan konsumen, keseluruhan bank yang dinilai mendapatkan nilai. HSBC memperoleh nilai tertinggi, yakni 62 persen. Disusul BCA pada peringkat kedua dengan nilai 60 persen. HSBC memperoleh nilai tersebut karena telah memiliki kebijakan yang jelas mengatur perlindungan konsumen. Sebagai contoh kebijakan yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi maupun jenis kelamin. Selain itu, HSBC berkomitmen untuk mengurangi keluhan pelanggan

dengan memberikan layanan berbasis teknologi yang lebih mudah dan cepat. Bank ini juga memberikan informasi kepada konsumen bagaimana melakukan transaksi melalui berbagai cara dengan aman untuk melindungi dari perampokan, pencurian maupun penipuan. Terkait perlindungan data pribadi, HSBC menjelaskan secara lengkap pada laman website terkait bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan dan dikelola oleh bank.

Grafik 16. Peringkat Bank pada Perlindungan Konsumen



BCA menempati peringkat kedua dengan perolehan nilai 60 persen. Perolehan nilai tersebut salah satunya karena BCA telah memiliki kode etik yang mengatur berbagai mekanisme dan prosedur antara staf dengan nasabah. Selain itu, HSBC juga telah memiliki kebijakan yang mengatur perlindungan

data pribadi nasabah. BCA juga tidak akan menyalurkan kredit kepada calon nasabah jika tidak sesuai dengan kebutuhan. BCA juga menerapkan inklusivitas pelayanan terhadap konsumen, termasuk penyandang disabilitas. Bank tersebut memiliki ATM khusus tuna netra untuk mempermudah

dan meningkatkan akses layanan keuangan.

Posisi ketiga diduduki oleh BNI dengan perolehan nilai 46 persen. Sama halnya dengan BCA, BNI juga memiliki inisiatif untuk mempermudah akses nasabah dengan disabilitas yang disediakan dengan pengguna kursi roda. BNI juga berupaya untuk transparan dalam menyampaikan risiko dan manfaat produk dengan melalui BNI Contact Center. Layanan ini juga mengevaluasi seberapa efektif staf BNI dalam memproses pengaduan nasabah dan menyelesaikan pengaduan nasabah dengan menyampaikan feedback. Posisi selanjutnya diduduki oleh Maybank dan DBS dengan perolehan nilai yang sama yaitu 43 persen. Maybank memperoleh nilai tersebut karena telah memiliki kebijakan yang mengatur transparansi informasi produk dan jasa yang ditawarkan. Selain hal tersebut, DBS juga

memastikan bahwa staf yang dimilikinya terlatih dalam menangani nasabah secara adil dan berkomunikasi secara jelas dan transparan.

Bank Mandiri menduduki peringkat keenam dengan perolehan nilai 34 persen. Perolehan nilai tersebut adalah karena Bank Mandiri telah memiliki Program Mandiri Sahabat Difabel dengan menyediakan fasilitas cabang ramah disabilitas. Selain itu, bank ini juga memberikan program pemagangan untuk masyarakat disabilitas. Bank-bank lain, seperti CIMB Niaga, BRI, BJB, Bank Danamon maupun Bank Permata memang telah memiliki kebijakan terkait perlindungan konsumen. Akan tetapi, pada kebijakan tersebut belum detail dalam menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dengan disabilitas, perlakuan konsumen bank dengan adil dan setara hingga perlindungan data pribadi konsumen.

Inklusi Keuangan

Pada tema inklusi keuangan, keseluruhan bank yang dinilai mendapatkan nilai. BRI menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai 53 persen. Menyusul Bank Mandiri dan BNI dengan perolehan nilai 51 persen dan 48 persen. Bank-bank pemerintah tersebut unggul dengan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai mandat dari pemerintah. Program-program peningkatan literasi dan inklusi keuangan tersebut diantaranya adalah penyaluran kredit untuk sektor UMKM dengan

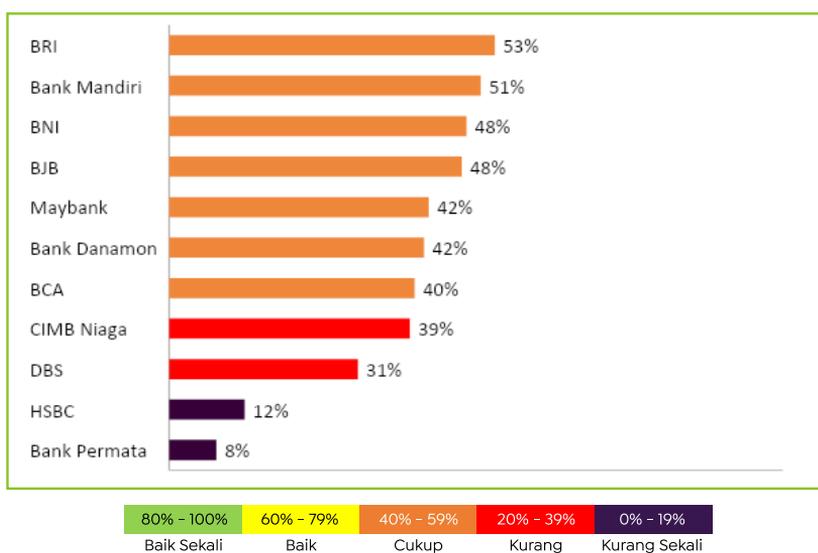
proporsi lebih dari 10 persen dari total kredit yang disalurkan. Sebagai contoh, pada tahun 2017, BRI menyalurkan 73,9 persen dari total kredit ke segmen UMKM. Sementara BNI menyalurkan 18 persen dan Bank Mandiri sebesar 12,5 persen dari total kreditnya.

Sebagai langkah akselerasi inklusi keuangan dan memudahkan akses masyarakat unbanked, bank menyediakan layanan perbankan tanpa cabang (*branchless*) maupun layanan uang non-tunai. Sebagai contoh

bank pemerintah seperti BRI dan BNI memberikan layanan *branchless banking* dalam bentuk agen BRILink dan agen 46. Layanan ini sebagai perpanjangan bank dalam memudahkan akses layanan keuangan masyarakat di daerah *remote* sehingga dapat bertransaksi seperti di kantor cabang. Selain hal tersebut, bank-bank tersebut melakukan digitalisasi layanan perbankan dengan memberikan layanan transaksi secara elektronik dan *online*. Untuk memberikan layanan pada buruh migran, bank-bank pemerintah tersebut juga memberikan layanan

remitansi di daerah dengan jumlah buruh migran Indonesia tertinggi, seperti Malaysia dan Hong Kong. HSBC dan Bank Permata mendapatkan nilai terendah pada tema perlindungan konsumen dengan perolehan nilai 12 persen dan 8 persen. Nilai ini tergolong sangat kurang. Perolehan nilai tersebut adalah karena HSBC dan Bank Permata tidak memiliki cabang untuk memperluas akses nasabah di pedesaan. Selain itu, penyaluran kredit ke sektor UMKM oleh bank-bank tersebut kurang dari 10 persen.

Grafik 17. Peringkat Bank pada Inklusi Keuangan



Remunerasi

Pada tema remunerasi, hanya empat bank yang memperoleh nilai, yakni DBS, HSBC, BCA dan Bank Danamon. Bank-bank tersebut tidak memperoleh nilai yang baik untuk tema remunerasi, padahal remunerasi merupakan

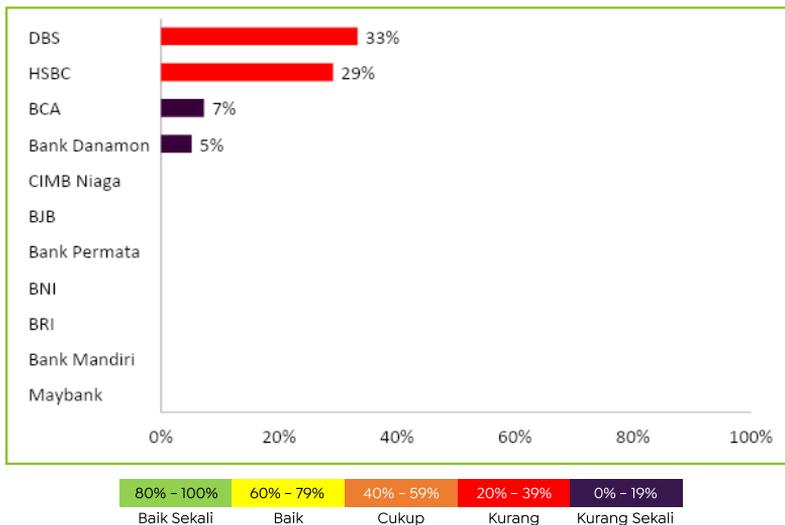
bagian dari kebijakan *Good Corporate Governance*. DBS menempati posisi pertama dengan perolehan nilai 33 persen. Menyusul HSBC dengan perolehan nilai 29 persen. Pada kebijakan remunerasi, DBS menetapkan

penentuan bonus berdasarkan pada kepuasan pegawai, kepuasan nasabah dan praktik operasional dan manajemen peningkatan dampak sosial dan lingkungan dari bank.

Sementara itu HSBC mengenakan *clawbacks* pada HSBC award selama jangka waktu tujuh tahun dari waktu pemberian. Hal ini dapat diperpanjang hingga 10 tahun. Mekanisme *clawbacks* banyak digunakan oleh perusahaan jasa keuangan dan biasanya ditulis dalam kontrak karyawan untuk pembayaran insentif seperti bonus. *Clawbacks* biasanya digunakan sebagai tanggapan atas pelanggaran, skandal, kinerja buruk atau penurunan laba perusahaan (Investopedia, 2019). Posisi ketiga

diduduki BCA dengan perolehan nilai 7 persen dan posisi terakhir diduduki Bank Danamon dengan perolehan nilai 5 persen. Sama halnya dengan HSBC, Bank Danamon juga menerapkan sistem *clawback* dengan melakukan penarikan kembali bonus kinerja apabila pejabat Danamon telah melakukan pelanggaran seperti kelalaian, fraud dan lain-lain pada tahun sebelumnya dan baru ditemukan tahun berikutnya. Sementara itu BCA juga menerapkan skema *clawbacks* kepada pihak yang menjadi *material risk takers* dalam kondisi tertentu sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015. Bank-bank lain tidak memperoleh nilai karena ketiadaan informasi spesifik terkait kebijakan remunerasi pada dokumen yang dipublikasikan.

Grafik 18. Peringkat Bank pada Tema Remunerasi



Transparansi dan Akuntabilitas

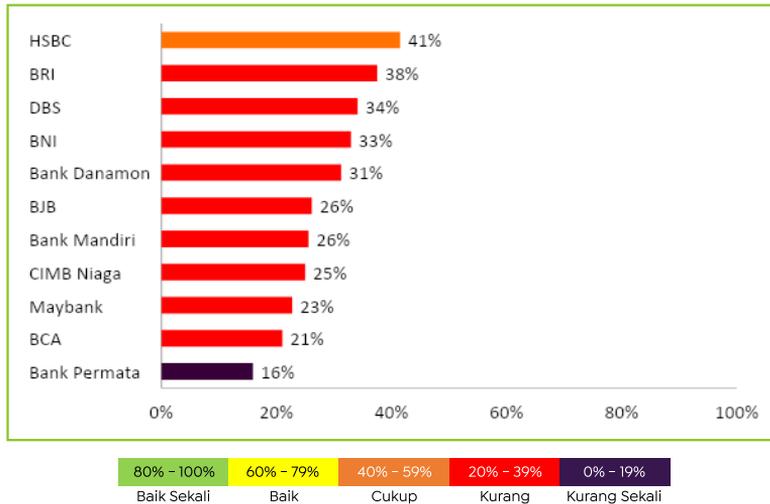
Pada tema transparansi dan akuntabilitas, keseluruhan bank yang dinilai memperoleh nilai. HSBC memimpin

pada posisi pertama dengan perolehan nilai 41 persen. Perolehan nilai tersebut karena HSBC telah secara terbuka

mempublikasikan negara-negara yang menjadi tujuan investasi. HSBC juga telah secara terbuka mempublikasikan jumlah perusahaan yang berhubungan dengan isu lingkungan dan sosial. Selain itu,

HSBC melibatkan berbagai pihak seperti nasabah, pakar industri, pemegang saham dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan.

Grafik 19. Peringkat Bank pada Tema Transparansi dan Akuntabilitas



BRI sebagai salah satu bank pemerintah unggul dalam perolehan nilai dibandingkan bank nasional lainnya. Sama hanya dengan HSBC, BRI telah secara terbuka mempublikasikan penjabaran portofolio kredit berdasarkan wilayah, skala dan sektor ekonomi. Selain itu, BRI secara terbuka mempublikasikan informasi hasil voting pada rapat umum pemegang saham. BRI juga telah mempublikasikan Laporan Keberlanjutan dengan mengacu pada standar GRI. Komitmen untuk transparan terhadap nasabah juga dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari nasabah melalui wawancara sehubungan dengan Laporan

Berkelanjutan. Masukan tersebut untuk memastikan informasi yang lebih detail terkait kinerja keberlanjutan seperti tanggung jawab sosial perusahaan.

Bank Permata memperoleh nilai terendah dengan perolehan nilai 16 persen. Sama halnya, Bank Permata juga telah mempublikasikan penjabaran portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi. Namun, tidak terdapat informasi terkait elemen-elemen lain yang menyebabkan perolehan nilai Bank Permata yang sangat kurang.

4 PENJELASAN PEROLEHAN NILAI PER BANK



Penjelasan Perolehan Nilai per Bank



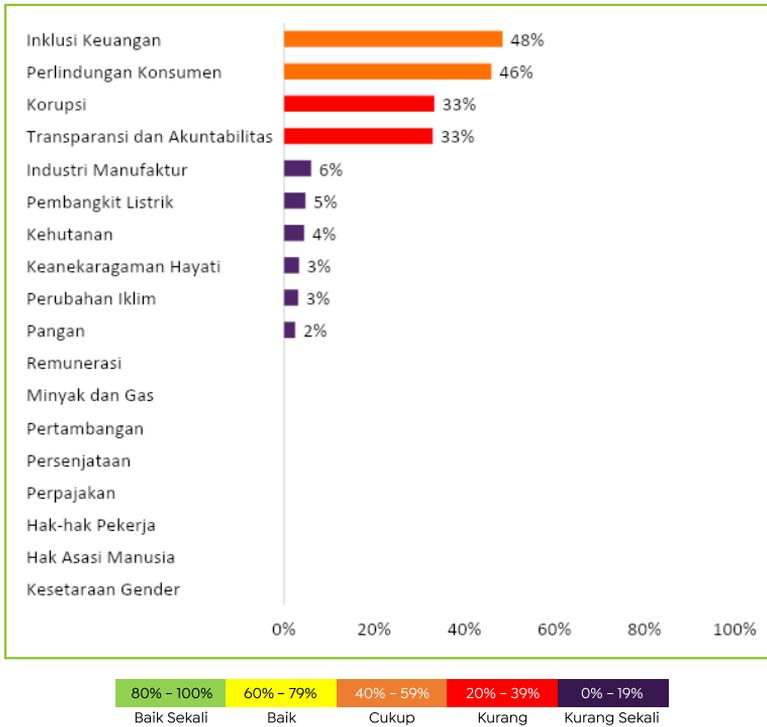
Berdiri pada tahun 1946, BNI adalah bank milik pemerintah ketiga terbesar di Indonesia saat ini dengan nilai aset sebesar 709,33 triliun rupiah dan modal inti sebesar 89,77 triliun rupiah per Desember 2017. BNI masuk kedalam kategori bank BUKU 4 dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah. BNI mengalami peningkatan jumlah rekening sebesar 31 persen dari 17 juta rekening menjadi 22 juta rekening di tahun 2017. Saat ini BNI memiliki 200 kantor cabang dalam negeri dan 6 jaringan luar negeri yang beroperasi di Amerika, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Myanmar dan Singapura. BNI memiliki 10 anak perusahaan dan berperan sebagai pemegang saham mayoritas di lima anak perusahaan yaitu BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance dan BNI Remittance.

Pada tahun 2017, BNI mencatat pertumbuhan portofolio kredit sebesar 12.2 persen yang mencapai 441,3 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman pada segmen kecil adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 61.5 persen (34,7 triliun rupiah), sektor perindustrian sebesar 9.5 persen (5,4 triliun rupiah) dan sektor jasa dunia usaha sebesar 9.5 persen (5,37 triliun rupiah). Sedangkan, tiga sektor utama yang paling banyak

menerima pinjaman pada segmen menengah adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 33% (23,22 triliun rupiah), sektor perindustrian sebesar 28.9% (20,29 triliun rupiah) dan sektor konstruksi sebesar 9.9% (6,98 triliun rupiah). BNI merupakan salah satu dari delapan Bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yaitu *"First Movers on Sustainable Banking"* yang diinisiasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2015.

Komitmen BNI dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan pembiayaan sektor ramah lingkungan yang sudah aktif diberlakukan oleh BNI sejak tahun 2007. Pada tahun 2017, BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau segmen korporasi sebesar 57,65 miliar rupiah yaitu 18.31 persen dari total kredit atau meningkat 10.77 persen dari tahun 2016. Selain itu BNI juga telah memiliki prosedur pemberian kredit korporasi yang mengharuskan debitur untuk memiliki izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan penilaian standar lingkungan PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Grafik 20. Nilai BNI pada Semua Tema dan Sektor 2018



BNI berada pada peringkat ke-5 dari 11 bank yang dinilai. BNI memperoleh nilai tertinggi pada tema inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, yakni sebesar 48 persen dan 46 persen. Skor pada tema inklusi keuangan salah satunya diperoleh karena BNI telah memperluas dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan bank melalui *branchless banking*, *cashless money*, digitalisasi layanan perbankan hingga kucuran kredit untuk UMKM. Pada 2017, BRI mencatat porsi pembiayaan UMKM mencapai 18,3 persen dari total penyaluran kredit sebesar 345,5 triliun rupiah. Sementara itu skor pada tema perlindungan konsumen salah satunya diperoleh karena BNI dengan

cukup jelas menyatakan bagaimana perlindungan terhadap data pribadi nasabah, penanganan keluhan nasabah, hingga layanan untuk nasabah dengan disabilitas.

BNI memperoleh nilai yang rendah pada tema industri manufaktur 6 persen, pembangkit listrik 5 persen, kehutanan 4 persen, keanekaragaman hayati 3 persen, perubahan iklim 3 persen dan pangan 2 persen. Meskipun skor pada tema industri manufaktur dan pembangkit listrik tergolong rendah, BNI sudah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan prinsip berkelanjutan pada tingkat kebijakan dan pengambilan keputusan. BNI telah aktif membiayai proyek ramah lingkungan dengan menyalurkan kredit

korporasi untuk pembangkit energi, air, geothermal dan mini hydro dan perusahaan yang bersertifikasi RSPO, ISPO dan PROPER. Pada 2017, BNI telah menyalurkan pembiayaan segmen korporasi hijau sebesar 57.646 triliun rupiah atau 30.66 persen dari total kredit korporasi. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 21,57 triliun rupiah atau 12.39 persen dari total kredit korporasi. Selain itu, BNI juga mendukung proyek energi terbarukan melalui pembelian Reksa Dana *Insight Renewable Energy* pada Maret 2017.

Pada tema operasional, BNI tidak memperoleh nilai pada tema remunerasi. Sementara itu pada tema sektoral, BNI tidak memperoleh nilai pada tema minyak dan gas, pertambangan dan persenjataan. Sedangkan, pada tema *cross cutting* BNI tidak memperoleh nilai pada tema perpajakan, hak-hak pekerja, hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hal tersebut karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.



Berdiri pada tahun 1895, BRI adalah bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. BRI memiliki nilai aset sebesar 1,126 triliun rupiah dan modal inti sebesar 159 triliun rupiah per Desember 2017. BRI masuk kedalam kategori bank BUKU 4 dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah. BRI memiliki 467 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia dan 5 kantor cabang luar negeri yang beroperasi di Caymand Island, Hongkong, New York, Singapura dan Timor Leste. Saat ini BRI memiliki lima anak perusahaan yaitu PT Bank BRI Syariah yang bergerak di bidang perbankan syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang bergerak di bidang perbankan, BRI Remittance Co. Ltd yang bergerak di bidang remitansi, PT Asuransi BRI Life yang bergerak di bidang asuransi dan PT BRI Multifinance

Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna.

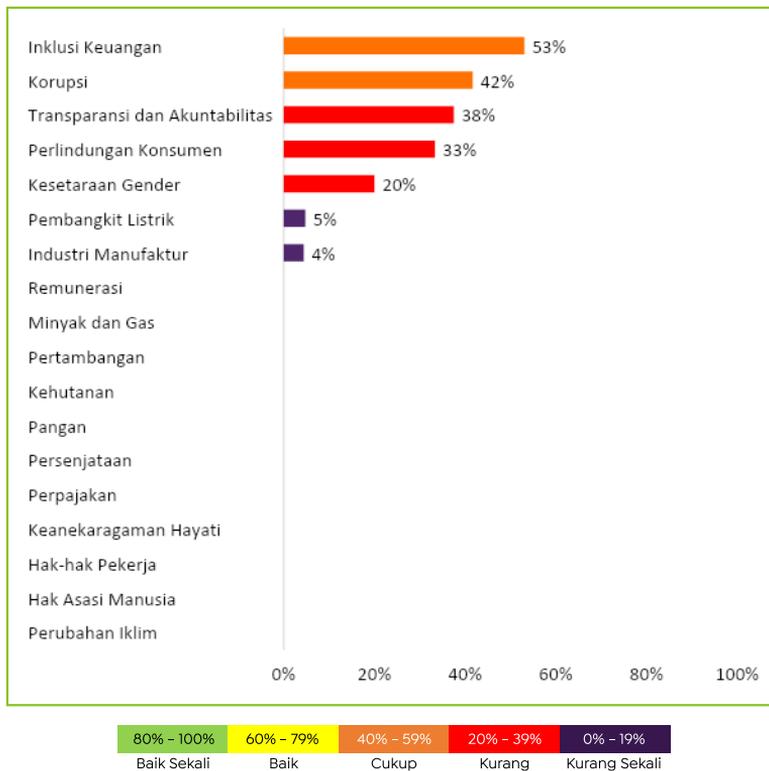
Pada tahun 2017, BRI Mencatat pertumbuhan portofolio kredit sebesar 11.4% yang mencapai 739,9 triliun rupiah. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan BRI tahun 2017, dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor perdagangan sebesar 34.32% (193,7 triliun rupiah), sektor pengolahan sebesar 10.56% (59,61 triliun rupiah) dan sektor pertanian sebesar 10.52% (59,38 triliun rupiah). BRI merupakan salah satu dari delapan Bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yaitu "First Step to Be A Sustainable Finance" yang diinisiasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan telah bekerjasama dengan World Wildlife Funding (WWF) Indonesia dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan sejak November 2015 sampai Juli 2017.

Komitmen BRI dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan pembiayaan sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan limbah, pertanian dan perikanan berkelanjutan, bangunan hijau, dan pariwisata berkelanjutan. Saat ini BRI sedang melakukan pemetaan pembiayaan tersebut untuk dikategorikan sebagai pembiayaan

berkelanjutan. Disamping itu, BRI menerbitkan SE Direksi Nomor S.27-DIR/DMR/04/2017 dalam rangka mendukung perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan ini mencakup prinsip pengelolaan industri kelapa sawit dan dibentuk agar debitur mempertimbangkan pengelolaan isu lingkungan. Pada tahun 2017, BRI telah menyalurkan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit bersertifikat RSPO/ISPO sebesar 23,24 miliar kepada 21 perusahaan. selain itu, BRI juga melakukan penilaian sektor usaha melalui instrumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Grafik 21. Nilai BRI pada Semua Tema dan Sektor 2018



BRI berada pada peringkat ke-3 dari 11 bank yang dinilai. BRI menduduki peringkat tertinggi jika dibandingkan bank nasional lain. BRI memperoleh nilai tertinggi pada tema inklusi keuangan dan korupsi, yakni sebesar 53 persen dan 42 persen. Skor pada tema inklusi keuangan salah satunya diperoleh karena BRI telah berupaya memperkuat dan memperluas akses masyarakat ke layanan perbankan seperti melalui program Tabungan BRI Simpedes yang ditujukan kepada segmen masyarakat pedesaan dan dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang menyediakan akses melalui jaringan ATM domestik bank lain, *Internet Banking* 24 jam dan layanan *Mobile Banking*. Pada 2017, BRI mencatat porsi pembiayaan UMKM mencapai 73,9 persen dari total penyaluran kredit sebesar 739,34 triliun rupiah. Sementara itu skor pada tema korupsi diperoleh salah satunya karena BRI telah menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

BRI memperoleh nilai yang rendah pada tema pembangkit listrik dan industri manufaktur, yakni sebesar 5 persen dan 4 persen. Meskipun skor pada tema pembangkit listrik tergolong rendah BRI menyatakan telah menyalurkan pembiayaan di sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, pertanian dan perikanan berkelanjutan, bangunan hijau, dan pariwisata berkelanjutan. Pembiayaan tersebut sedang dipetakan untuk dikategorikan sebagai pembiayaan

berkelanjutan. BRI memiliki target untuk mengembangkan otomatisasi sistem pemetaan pembiayaan berkelanjutan hingga 2019.

Pada tema operasional, BRI tidak memperoleh nilai pada tema remunerasi. Sementara itu pada tema sektoral, BRI tidak memperoleh nilai pada tema minyak dan gas, pertambangan, kehutanan, pangan dan persenjataan. Sedangkan, pada tema *cross cutting*, BRI tidak memperoleh nilai pada tema perpajakan, keanekaragaman hayati, hak-hak pekerja, hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal tersebut karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.



Mandiri telah berdiri sejak 140 tahun lalu dengan entitas selaku Bank pemerintah yang merupakan hasil merger dari 4 bank besar pada tahun 1999. Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah terbesar kedua di Indonesia dengan nilai ndus sebesar 1,124.7 triliun rupiah dan modal inti sebesar 145,6 triliun rupiah per Desember 2017. Bank Mandiri masuk kedalam kategori bank BUKU 4 dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah Mandiri memiliki jumlah rekening sebesar 21.9 juta rekening yang didukung oleh 139 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang di Indonesia, Mandiri juga memiliki 7 kantor cabang luar negeri yang beroperasi di Cayman Island, Hongkong, Inggris, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura dan Timor Leste. Saat ini Mandiri Bank Mandiri memiliki sebelas anak perusahaan yang diantaranya adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri AXA General Insurance.

Pada tahun 2017, Mandiri mencatat pertumbuhan industri kredit sebesar 10.2% yang mencapai 729,5 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga ndust utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu ndust perkebunan sebesar 35% (67,2 triliun rupiah), industri ketenagalistrikan sebesar 14% (26,6 triliun rupiah) dan

industri makanan dan minuman sebesar 13% (24,9 triliun rupiah) Mandiri merupakan salah satu dari delapan Bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yaitu “*First Movers on Sustainable Banking*” yang diinisiasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015.

Komitmen Mandiri dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penyaluran kredit ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan kerjasamayang dilakukan industri Agence Francaise de Development (AFD) dalam proyek yang bernilai US\$100 juta untuk membiayai proyek hydropower, biogas dan *combined-cycle power plant*. Selain itu, penyaluran kredit ramah lingkungan lain adalah pada industri perkebunan yang proporsinya sekitar 13.91% dari total kredit bank Mandiri yang berjumlah 729,55 triliun rupiah pada tahun 2017. Penyaluran kredit di bidang perkebunan ini diklasifikasikan dalam beberapa komoditas yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi dan komoditas agro lainnya. Mayoritas penyaluran kredit diberikan kepada industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya yang telah mendapat sertifikat ISPO yaitu sebesar 87.55% dari total kredit perkebunan.

Bank Mandiri berada pada peringkat ke-8 dari 11 bank yang dinilai. Bank Mandiri memperoleh nilai tertinggi pada tema inklusi keuangan dan

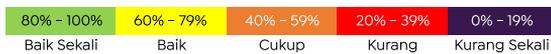
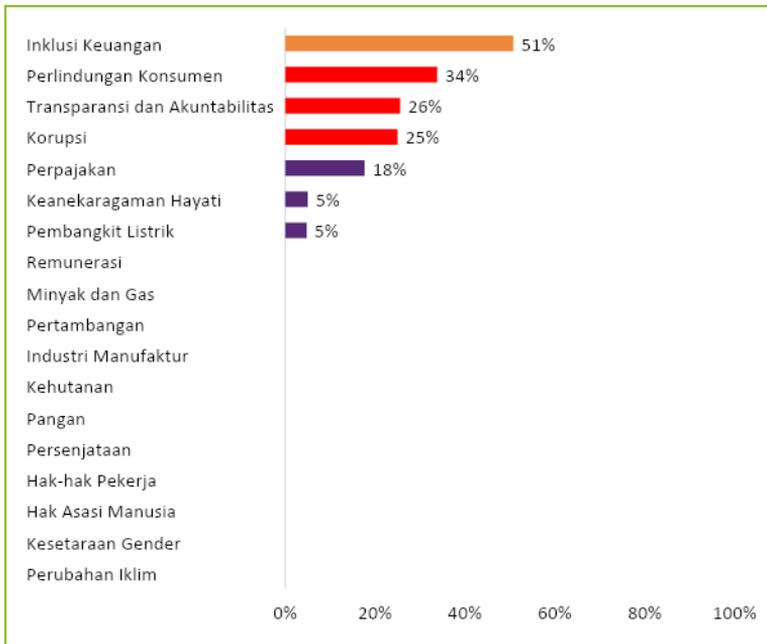
perlindungan konsumen, yakni sebesar 51 persen dan 34 persen. Skor pada tema inklusi keuangan diperoleh karena Mandiri telah berupaya memperkuat dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui digitalisasi layanan perbankan seperti Mandiri *Online*, Mandiri ATM, EDC Mandiri, Uang Elektronik, E-cash, dan *branchless banking*. Pada 2017, Mandiri mencatat porsi pembiayaan UMKM mencapai 12,47 persen dari total penyaluran kredit sebesar 35,7 triliun rupiah. Mandiri juga berupaya mendorong literasi keuangan salah satunya melalui program “Mandiri Edukasi” yang dilaksanakan di 12 kota. Sementara itu skor pada perlindungan konsumen salah satunya diperoleh karena Mandiri telah meluncurkan Program “Sahabat Difabel” yaitu ATM ramah disabilitas dan program magang bagi penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi konsumen penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan dan meningkatkan pengalaman dan pengetahuan penyandang disabilitas di sektor perbankan.

Mandiri memperoleh nilai yang rendah pada sektor keanekaragaman hayati dan pembangkit listrik dengan skor masing-masing sebesar 5 persen. Meskipun skor pada tema pembangkit listrik tergolong rendah, dalam menyalurkan kredit Mandiri menyatakan akan memprioritaskan pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan proyek lain yang mengadopsi prinsip

keberlanjutan.

Pada tema operasional Mandiri tidak memperoleh nilai pada tema remunerasi. Sedangkan, pada tema sektoral Mandiri tidak memperoleh nilai pada tema minyak dan gas, pertambangan, industri manufaktur, kehutanan, pangan dan persenjataan. Sementara itu, pada tema *cross cutting* Mandiri tidak memperoleh nilai pada tema hak-hak pekerja, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Hal tersebut karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.

Grafik 22. Nilai Bank Mandiri pada Semua Tema dan Sektor 2018



Berdiri pada tahun 1957, BCA adalah bank swasta (non pemerintah) terbesar di Indonesia saat ini dengan nilai aset sebesar 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2017. BCA masuk kedalam kategori BUKU 4 dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah. BCA memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang di Indonesia, BCA juga memiliki cabang di Hongkong dan Singapura. Saat ini BCA memiliki delapan anak perusahaan

yang bergerak dalam enam linea bisnis yaitu BCA Finance dan CS Finance yang bergerak pada pembiayaan bermotor, BCA Insurance dan BCA Life yang bergerak di bidang asuransi, BCA sekuritas yang bergerak di bidang sekuritas, BCA Syariah yang bergerak di bidang perbankan syariah, BCA Finance Ltd yang bergerak di bidang remitansi dan Central Capital Ventura (CCV) yang bergerak di bidang teknologi finansial dan industri finansial.

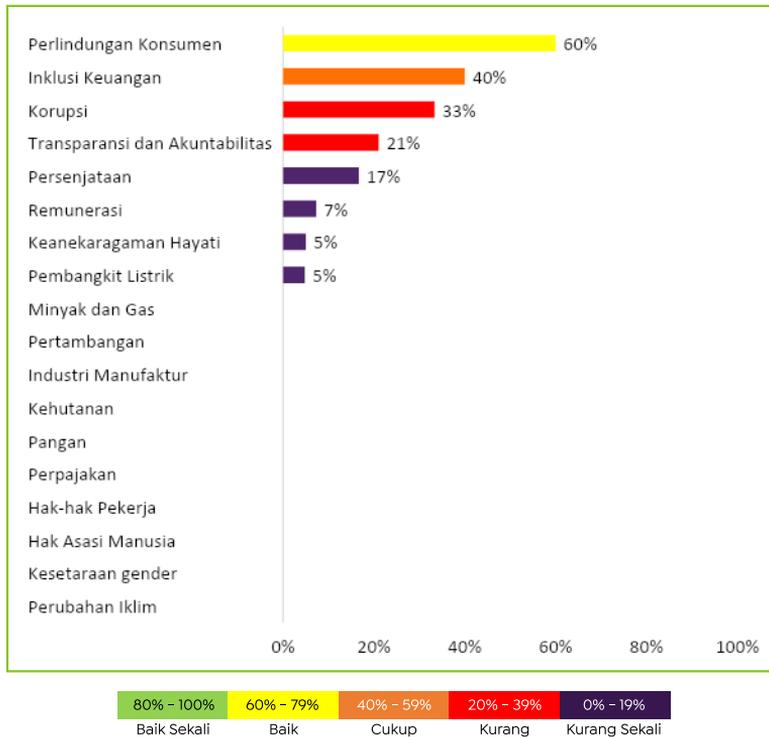
Pada tahun 2017 BCA mencatat pertumbuhan penyaluran kredit

korporasi sebesar 14.5% yang mencapai 177,3 triliun rupiah. Sektor industri yang mendapat penyaluran kredit paling besar adalah sektor perkebunan dan pertanian sebesar 12,6% disusul oleh sektor jasa keuangan sebesar 10,6% dan sektor pembangkit energi dan tenaga listrik sebesar 7,3%. Sedangkan, berdasarkan portofolio kredit, BCA mencatat pertumbuhan sebesar 12,4% yang mencapai 467,5 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 25,94% (110,64 triliun rupiah) lalu diikuti oleh sektor manufaktur sebesar 18,85% (80,41 triliun rupiah) dan sektor jasa bisnis sebesar 10,60% (45,22 triliun rupiah). BCA merupakan salah satu dari delapan bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut pilot project “*First Movers on Sustainable Banking*” yang diinisiasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015.

Komitmen BCA dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) diwujudkan dengan meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan menjadi sebesar 27,15 triliun di tahun 2017. Angka ini meningkat sebesar 10.5% dari tahun 2016. Penyaluran kredit tersebut memprioritaskan pembiayaan sektor-sektor yang berhubungan dengan pertanian berkelanjutan, infrastruktur hijau, kehutanan berkelanjutan, energi

terbarukan, industri daur ulang, efisiensi energi, dan gedung hijau. Selain itu, komitmen BCA dalam mendukung program pembangunan pemerintah seperti inklusi keuangan diwujudkan dengan menyalurkan porsi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 103,55 miliar per Desember 2017.

Grafik 23. Nilai BCA pada Semua Tema dan Sektor Tahun 2018



BCA berada pada peringkat ke-4 dari 11 bank yang dinilai. BCA memperoleh nilai tertinggi pada tema perlindungan konsumen dan inklusi keuangan, yakni sebesar 60 persen dan 40 persen.

Skor pada tema perlindungan konsumen diperoleh karena BCA sudah memiliki kebijakan perlindungan konsumen yang meliputi penjelasan produk, perlakuan konsumen secara adil dan merata, penanganan keluhan konsumen, perlindungan data pribadi konsumen, perlindungan dari tindakan kriminal, hingga fasilitas untuk memudahkan nasabah dengan disabilitas.

Sementara itu skor pada tema inklusi

keuangan salah satunya diperoleh karena BCA telah memperluas jangkauan masyarakat ke layanan perbankan dengan mendirikan kantor cabang yang tidak hanya terpusat di kota namun juga di daerah pedesaan. BCA juga mengembangkan penyaluran kredit UKM melalui pilot project yang tersebar di beberapa cabang. Pada 2017, BCA mencatat porsi pembiayaan UMKM mencapai 15 persen dari total penyaluran kredit sebesar 467,5 triliun rupiah. BCA mendorong literasi keuangan melalui program edukasi dan sosialisasi yang menysasar pelajar, buruh migran Indonesia (BMI), kelompok perempuan hingga kelompok pekerja.

BCA memperoleh nilai yang rendah pada tema remunerasi 7 persen dan keanekaragaman hayati 5 persen dan pembangkit listrik 5 persen. Meskipun skor pada tema keanekaragaman hayati tergolong rendah, BCA secara berkala menilai dan meninjau kebijakan kredit dan pembiayaan proyek mereka. BCA juga berkomitmen untuk tidak memberikan kredit kepada perusahaan atau proyek yang berperingkat PROPER merah dan hitam. Sementara itu, pada tema pembangkit listrik BCA menyatakan bahwa mereka mendukung

pembiayaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan sektor pertanian organik.

Pada tema sektoral, BCA tidak memperoleh nilai pada tema minyak & gas, pertambangan, industri manufaktur, kehutanan dan pangan. Sedangkan, pada tema *cross cutting* BCA tidak memperoleh nilai pada tema perpajakan, hak-hak pekerja, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Hal tersebut karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.

CIMB NIAGA

Berdiri pada tahun 1955 sebagai Bank Niaga, CIMB-Niaga adalah bank berbadan hukum di Indonesia, dengan modal joint-venture yang didominasi CIMB Group yang berpusat di Malaysia. Pada akhir tahun 2017, CIMB Niaga merupakan bank terbesar ke-5 di Indonesia dengan nilai aset sebesar 266 triliun rupiah dan modal inti sebesar 35,53 triliun rupiah. CIMB termasuk kedalam bank BUKU 4 dengan modal inti minimum sebesar 30 triliun rupiah. CIMB Niaga memiliki 542 kantor cabang yang terdiri dari kantor cabang konvensional, syariah dan unit mikro. Saat ini CIMB Niaga memiliki satu anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF). PT CNAF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia yang memiliki izin untuk melakukan tiga kegiatan usaha

yaitu sewa guna (leasing), anjak piutang (factoring) dan pembiayaan konsumen.

Pada tahun 2017, CIMB Niaga mencatat pertumbuhan portofolio kredit sebesar 2,8% yang mencapai 185 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor sektor manufaktur sebesar 21,1% (39 triliun rupiah), sektor perdagangan, restoran, hotel dan administrasi sebesar 21% (38,8 triliun rupiah) dan sektor jasa bisnis sebesar 14,3% (26,5 triliun rupiah).

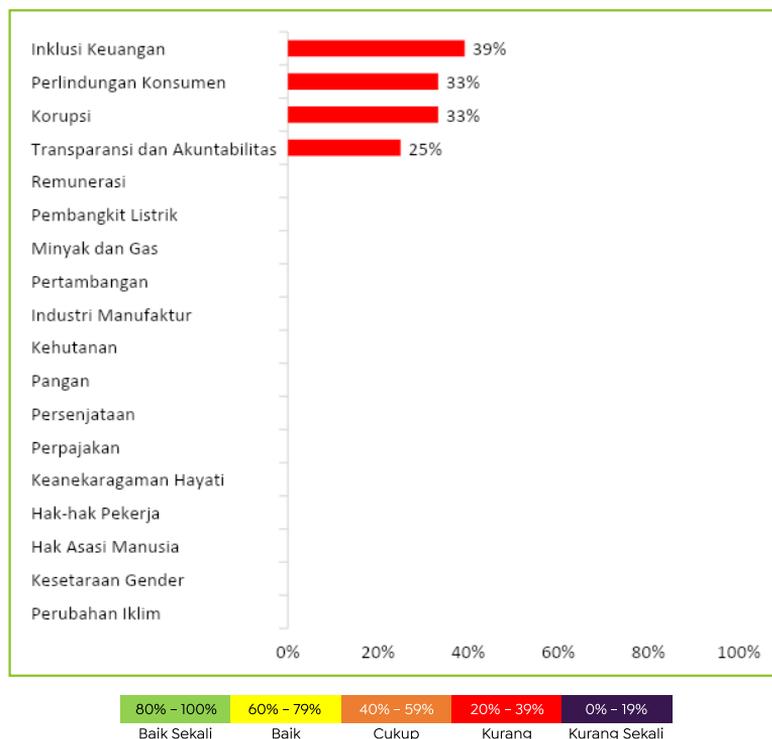
Komitmen CIMB Niaga dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan dengan menerapkan kebijakan kredit ramah lingkungan khususnya penyaluran kredit pada sektor industri berbasis manufaktur, perkebunan, pertambangan dan infrastruktur berskala besar. Sektor-sektor

tersebut diwajibkan untuk menerapkan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan yaitu PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dimana suatu perusahaan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit jika mendapat peringkat 'hitam' dalam penilaian tersebut. Selain itu CIMB Niaga juga memiliki kebijakan untuk menangani hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan berskala besar atau berisiko tinggi.

CIMB Niaga berada pada peringkat ke-10 dari 11 bank yang dinilai. CIMB Niaga memperoleh nilai tertinggi pada tema inklusi keuangan. Skor pada tema inklusi keuangan salah satunya diperoleh karena CIMB Niaga telah memperluas jangkauan masyarakat ke layanan perbankan melalui *branchless banking*, *internet banking* "CIMB Clicks", *mobile banking* "Go Mobile" dan rekening ponsel. Pada 2017, CIMB Niaga mencatat porsi pembiayaan UMKM mencapai 15.42 persen dari total penyaluran kredit sebesar 185.1 triliun rupiah. CIMB Niaga juga telah berupaya mendorong inklusi keuangan melalui edukasi dan sosialisasi yang menasar segmen pelajar, mahasiswa, masyarakat, staff hingga penyandang disabilitas di tingkat kota maupun desa. Beberapa program yang telah dijalankan antara lain bertajuk *Tour de Bank Program*, *Mini Banking Laboratory*, Si Mobil Literasi Keuangan program dan *Certified Financial Planner* (CFP).

CIMB Niaga memperoleh skor yang sama pada tema perlindungan konsumen dan korupsi yaitu sebesar 33 persen. Skor pada tema perlindungan konsumen diperoleh salah satunya karena CIMB Niaga transparan dalam menyampaikan risiko terkait profil risiko dan juga manfaat produk investasi di situs web, misalnya reksadana. CIMB Niaga juga berkomitmen untuk melindungi data ataupun informasi pribadi nasabah. Sementara itu skor pada tema korupsi diperoleh karena CIMB Niaga secara jelas menyatakan adanya kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. CIMB Niaga hanya memperoleh nilai pada tema inklusi keuangan, perlindungan konsumen, korupsi dan transparansi dan akuntabilitas. CIMB Niaga tidak memperoleh skor pada teman lain karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.

Grafik 24. Nilai CIMB-Niaga pada Semua Tema dan Sektor 2018



Danamon

Berdiri pada tahun 1956, Danamon adalah bank umum berbadan hukum Indonesia, dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Asia Financial yang berpusat di Singapura. Danamon memiliki nilai aset sebesar 153,5 triliun rupiah dan modal inti sebesar 33,36 triliun rupiah per 31 Desember 2017. Danamon masuk kedalam kategori bank BUKU 4 dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah. Danamon memiliki 992 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Danamon memiliki dua anak perusahaan yang bergerak dalam dua

linea bisnis yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) yang bergerak di bidang pembiayaan dan PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) yang bergerak di bidang asuransi.

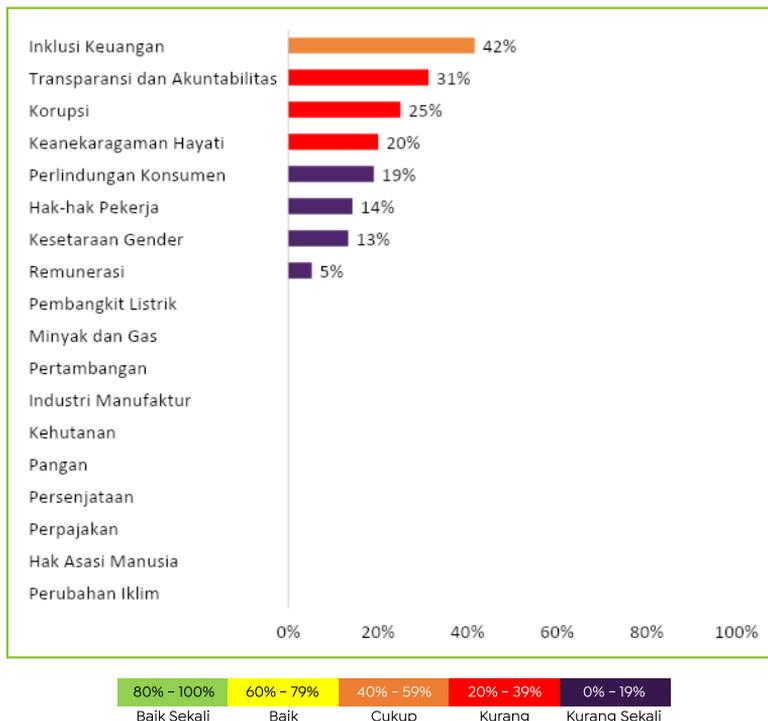
Pada tahun 2017, Danamon mencatat pertumbuhan pinjaman yang diberikan sebesar 1.9% menjadi 124,77 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor rumah tangga dan pembiayaan konsumen yaitu sebesar 39.4% (49,15 triliun rupiah), sektor grosir

dan eceran sebesar 29% (36,22 triliun rupiah) dan sektor manufaktur sebesar 14.6% (18,19 triliun rupiah).

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan oleh Danamon pada tahun 2015, komitmen Danamon dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui diterapkannya prinsip-prinsip sosial lingkungan dalam kegiatan penyaluran pinjaman. Danamon berkomitmen untuk tidak membiayai perusahaan yang dapat membahayakan lingkungan yang bergerak di sektor penjualan bahan kimia, bahan beracun, bahan perusak ozon dan radioaktif. Selain itu, Danamon juga berkomitmen untuk tidak membiayai proyek-proyek yang terletak

di kawasan lindung seperti daerah lindung budidaya dan kawasan yang sensitif secara ekologis maupun sosial. Beberapa instrumen yang digunakan adalah standar PROPER dan juga pelaporan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Danamon tidak mengeluarkan Laporan keberlanjutan pada tahun-tahun selanjutnya walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Grafik 25. Nilai Bank Danamon pada Semua Tema dan Sektor 2018



Bank Danamon berada pada posisi ke-7 dari 11 bank yang dinilai. Danamon memperoleh nilai tertinggi pada tema inklusi keuangan dan transparansi dan akuntabilitas dengan skor masing-masing sebesar 42 persen dan 31 persen. Skor pada tema inklusi keuangan salah satunya diperoleh karena Bank Danamon telah memperluas akses dan jangkauan masyarakat ke layanan perbankan salah satunya melalui *Danamon Online Banking* dengan fitur yang mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi belanja *online*. Bank Danamon juga telah berupaya mendorong literasi keuangan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang menasar pengusaha UMKM, ibu rumah tangga, pelajar, PNS dan karyawan koperasi. Hingga Triwulan ke 4 tahun 2015 Bank Danamon telah mengedukasi masyarakat sebanyak 41.303 orang.

Skor pada tema transparansi dan akuntabilitas salah satunya diperoleh karena Bank Danamon telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam program dan kebijakan kredit dan investasi. Beberapa komitmen yang dinyatakan oleh Bank Danamon antara lain (1) pernyataan bahwa tidak akan menyalurkan pinjaman kepada perusahaan atau proyek yang membahayakan lingkungan, (2) melakukan analisis sosial dan lingkungan sebelum menyalurkan pinjaman, (3) mewajibkan seluruh nasabahnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku pada ranah nasional dan lokal terkait aspek lingkungan dan sosial, (4) mewajibkan seluruh debitur untuk mematuhi

rekomendasi AMDAL dan (5) komitmen untuk tidak membiayai proyek di daerah sensitif seperti kawasan lindung.

Bank Danamon memperoleh nilai yang rendah pada tema hak-hak pekerja, kesetaraan gender dan remunerasi dengan skor masing-masing sebesar 14 persen, 13 persen dan 5 persen. Meskipun skor pada tema kesetaraan gender tergolong kurang, kebijakan internal Bank Danamon telah secara lugas menyatakan bahwa mereka memberlakukan pemberian gaji yang pantas tanpa membedakan gender, etnis, agama, maupun status sosial. Danamon juga menyatakan tidak akan mentoleransi segala bentuk diskriminasi ras, agama, gender, status sosial, disabilitas hingga status perkawinan. Sedangkan, pada tema remunerasi Bank Danamon juga telah mengatur kebijakan terkait penarikan kembali bonus kinerja (*clawback*) jika pejabat danamon terbukti melakukan pelanggaran seperti kelalaian, fraud dan lain lain. Sementara itu pada tema hak-hak pekerja, Bank Danamon menyatakan tidak akan terlibat dalam segala bentuk pekerja anak (*child labour*). Pada tema sektoral, Bank Danamon tidak memperoleh nilai sama sekali sedangkan pada tema *cross cutting* Bank Danamon tidak memperoleh nilai pada tema perpajakan, hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal tersebut karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.

Berdiri pada tahun 1961, Bank BJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Provinsi Banten, Pemda Kota- Kabupaten Se-Jawa Barat dan Pemda Kota-Kabupaten Se-Banten. BJB memiliki nilai aset sebesar 114,98 triliun rupiah dan modal inti sebesar 9,3 triliun rupiah per 31 Desember 2017. Bank BJB masuk kedalam kategori bank BUKU 3 dengan nilai modal inti antara 5 sampai 30 triliun rupiah. Saat ini Bank BJB memiliki 65 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bank BJB memiliki tiga anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan yaitu Bank BJB Syariah, PT BPR Intan Jabar dan PT BPR Karya Utama Jabar.

Pada tahun 2017, BJB mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 12,27% menjadi sebesar 76,5 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor konstruksi sebesar 9.55% (6,78 triliun rupiah), sektor jasa-jasa dunia usaha sebesar 8.19% (5,82 triliun rupiah) dan sektor perdagangan sebesar 3.64% (2,58 triliun rupiah).

Komitmen BJB dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui pembiayaan proyek hijau. Sepanjang tahun 2017, bank BJB

telah menyalurkan kredit pembiayaan hijau sebesar 271 miliar rupiah. Sektor yang paling banyak menerima pembiayaan adalah sektor infrastruktur hijau sebesar 68% (185,13 miliar rupiah) lalu diikuti oleh sektor bangunan hijau sebesar 24% (65,33 miliar rupiah), sektor efisiensi energi sebesar 3.63% (9,86 miliar rupiah), sektor industri daur ulang sebesar 2.7% (7,33 miliar rupiah) dan sektor sanitasi atau penyediaan air bersih sebesar 1.6% (4,28 miliar rupiah). Selain itu bank BJB juga telah memiliki prosedur pemberian kredit korporasi yang mengharuskan debitur untuk memiliki izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Tahun 2018 adalah pertama kalinya BJB masuk dalam penilaian *Bank Assessment*. Sebagai perwakilan dari bank pemerintah daerah, bank ini berada pada posisi ke-9 dari 11 bank yang dinilai. BJB memperoleh skor yang tinggi pada tema inklusi keuangan dengan perolehan nilai 48 persen. Skor pada tema inklusi keuangan salah satunya diperoleh karena BJB telah meluncurkan program BJB BiSA yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan ke layanan perbankan melalui *branchless banking*. Sementara itu BJB juga bekerjasama dengan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan pada buruh migran yang berada di Hong Kong. BJB juga memiliki program KPR

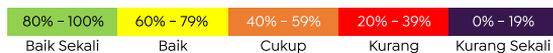
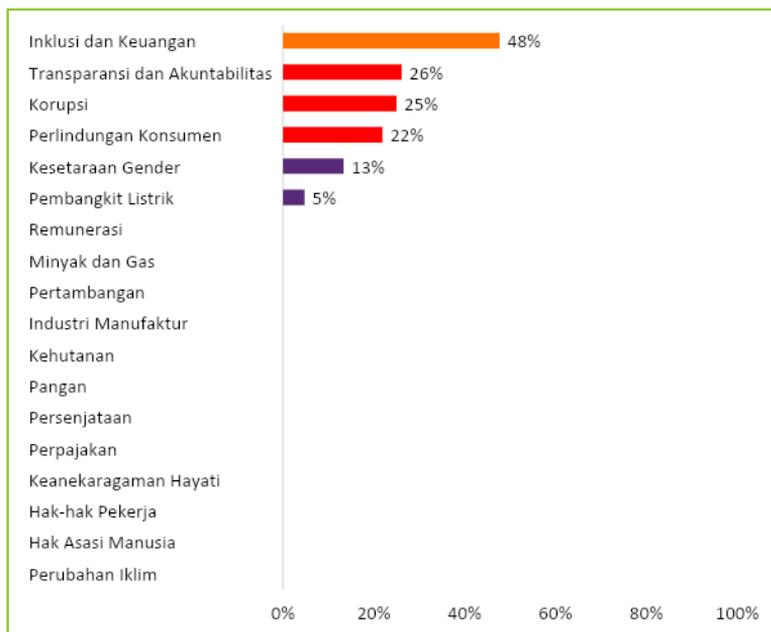
Sejahtera yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BJB memperoleh nilai yang rendah pada tema kesetaraan gender dan pembangkit listrik, yakni sebesar 13 persen dan 5 persen. Meskipun skor pada tema kesetaraan gender tergolong rendah, BJB secara jelas menyatakan bahwa mereka memberikan kesempatan dan pelatihan kerja yang setara bagi seluruh orang tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun

kondisi fisik. Sedangkan, pada tema pembangkit listrik BJB menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan ke proyek hijau seperti bangunan hijau, pengelolaan limbah publik, persediaan air dan efisiensi energi.

Namun demikian, BJB hanya memperoleh nilai pada tema inklusi keuangan, transparansi dan akuntabilitas, korupsi, perlindungan konsumen, kesetaraan gender dan pembangkit listrik. BJB tidak memperoleh skor pada tema lain karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.

Grafik 26. Nilai Bank BJB pada Semua Tema dan Sektor 2018

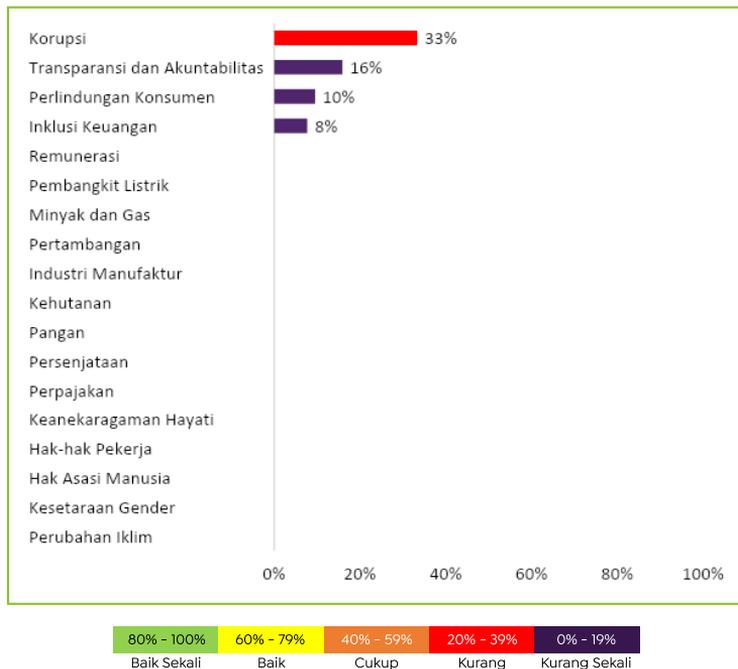


Berdiri pada tahun 1954, Permata didirikan dengan nama PT Bank Persatuan Dagang Indonesia dengan pemegang saham utama yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank . Permata memiliki nilai aset sebesar 148,33 triliun rupiah dan modal inti sebesar 16 triliun rupiah per 31 Desember 2017. Permata masuk kedalam kategori bank BUKU 3 dengan modal inti antara 5 sampai 30 triliun rupiah. Saat ini Permata memiliki 327 kantor cabang yang beroperasi di 62 kota di seluruh Indonesia. Permata memiliki satu anak perusahaan yaitu PT Sahabat Finansial Keluarga yang bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen.

Pada tahun 2017, Permata mencatat pertumbuhan pinjaman yang diberikan sebesar 3% menjadi 58,3 triliun. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor kredit individual untuk pemilikan rumah, pemilikan

kendaraan bermotor, dan lain-lain sebesar 33.46% (30,12 triliun rupiah), sektor industri pengolahan sebesar 23.29% (20,96 triliun rupiah) dan sektor perdagangan besar dan kecil sebesar 21.4% (19,27 triliun rupiah). PermataBank memiliki komitmen untuk patuh terhadap pelaksanaan inisiatif keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan POJK 51/2017. Saat ini, PermataBank sedang melakukan penyesuaian guna mempersiapkan diri untuk menuangkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam regulasi dan praktek yang berlaku efektif di tahun 2019.

Grafik 27. Nilai Bank Permata pada Semua Tema dan Sektor 2018



Tahun 2018 adalah tahun pertama untuk penilaian Bank Permata dalam *Bank Assessment*. Bank Permata berada pada posisi terbawah dari keseluruhan bank yang dinilai. Bank Permata memperoleh nilai tertinggi pada tema korupsi, yakni sebesar 33 persen. Skor pada tema korupsi diperoleh karena Bank Permata secara jelas menyatakan adanya kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta memiliki jaring pengaman tambahan ketika bersinggungan dengan pembiayaan perusahaan atau proyek yang berhubungan dengan *Politically Exposed Person*.

Bank Permata memperoleh nilai terendah pada tema inklusi keuangan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh porsi kredit UMKM Permata yang masih tercatat rendah yaitu sebesar 6.4 persen pada 2017. Meskipun demikian Bank Permata terus berupaya memperluas jangkauan masyarakat ke layanan keuangan salah

satunya melalui fasilitas mobile banking PermataMobile yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi secara online. Bank Permata juga merilis beberapa produk e-Channel lain untuk terus meningkatkan layanan kepada nasabah, seperti eBond yang membantu nasabah untuk melakukan transaksi Surat Utang Negara. Bank Permata hanya memperoleh nilai pada tema korupsi, transparansi dan akuntabilitas, perlindungan konsumen dan inklusi keuangan karena pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank tidak ditemukan informasi spesifik terkait elemen-elemen yang dinilai. Tidak juga ditemukan dokumen kebijakan pembiayaan atau pemberian kredit sektoral dari bank tersebut yang menjadikan tidak adanya nilai pada tema-tema seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, hingga pertambangan dan minyak dan gas.



Berdiri pada tahun 1959, PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bagian dari Grup Malayan Banking Berhad (Maybank) yang merupakan salah satu penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Maybank memiliki nilai aset sebesar 173,25 triliun rupiah dan modal inti sebesar 18,88 triliun rupiah per 31 Desember 2017. Maybank masuk kedalam

kategori bank BUKU 3 dengan klasifikasi modal inti antara 5 sampai 30 triliun rupiah. Maybank Indonesia memiliki 407 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia serta 2 cabang di luar negeri yaitu di Mauritius dan Mumbai, India. Saat ini Maybank memiliki dua anak perusahaan yang keduanya bergerak dalam pembiayaan multi-financing yaitu

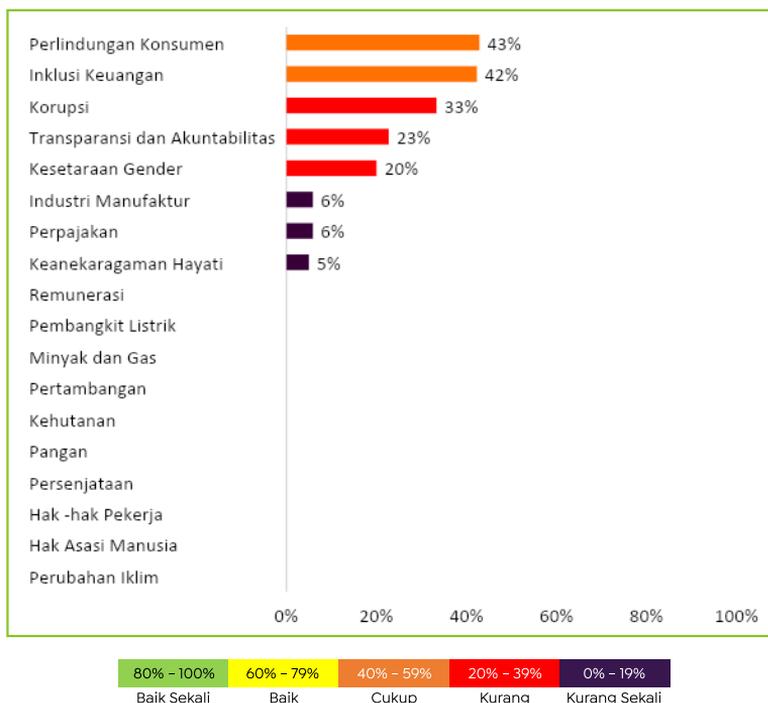
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT Maybank Indonesia Finance.

Pada tahun 2017, Maybank mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 3% menjadi 125,4 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor perindustrian sebesar 18.85% (23,65 triliun rupiah), sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 17.57% (22 triliun rupiah) dan sektor jasa dunia usaha sebesar 11.62% (14,58 triliun rupiah).

Komitmen Maybank dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penerapan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST)

dalam pembiayaan. Maybank melakukan peninjauan atas kegiatan operasional debitur dan calon debitur agar mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku khususnya melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terutama pada debitur yang berskala besar dan beresiko tinggi. Hal ini diatur berdasarkan SE. 2016.016/DIR RISK MGMT yang menyebutkan bahwa Maybank Indonesia tidak akan membiayai aktivitas usaha yang melanggar hukum lingkungan seperti mendapat peringkat Merah atau Hitam dalam daftar Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Grafik 28. Nilai Maybank pada Semua Tema dan Sektor 2018



Tahun 2018 adalah tahun pertama penilaian Maybank dalam *Bank Assessment*. Maybank berada pada peringkat ke-6 dari 11 bank yang dinilai. Bank ini memperoleh nilai tertinggi pada tema perlindungan konsumen dan inklusi keuangan, yakni sebesar 43 persen dan 42 persen. Skor pada tema perlindungan konsumen salah satunya diperoleh karena Maybank telah memiliki regulasi terkait penjelasan produk dan layanan, perlakuan konsumen yang adil dan setara, penanganan keluhan nasabah, hingga perlindungan data konsumen. Sementara itu skor pada tema inklusi keuangan salah satunya diperoleh karena Maybank terus mengembangkan layanan dan kapasitas e-banking melalui *mobile banking*, *internet banking*, Maybank2U (*mobile banking* berbasis internet), MOVE (layanan pembukaan tabungan *online*) dan melalui channel-channel lain. Pada 2017, Maybank mencatat porsi pembiayaan UMKM mencapai 25,73 persen dari total penyaluran kredit sebesar 125,4 triliun rupiah. Maybank juga berupaya mendorong literasi keuangan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, nasabah hingga komunitas penyandang disabilitas. Edukasi perbankan ini antara lain mencakup materi pengetahuan keuangan, pemahaman produk perbankan, pengelolaan keuangan dan perlindungan nasabah khususnya bagi nasabah pemegang kartu kredit.

Maybank memperoleh nilai terendah pada tema industri manufaktur

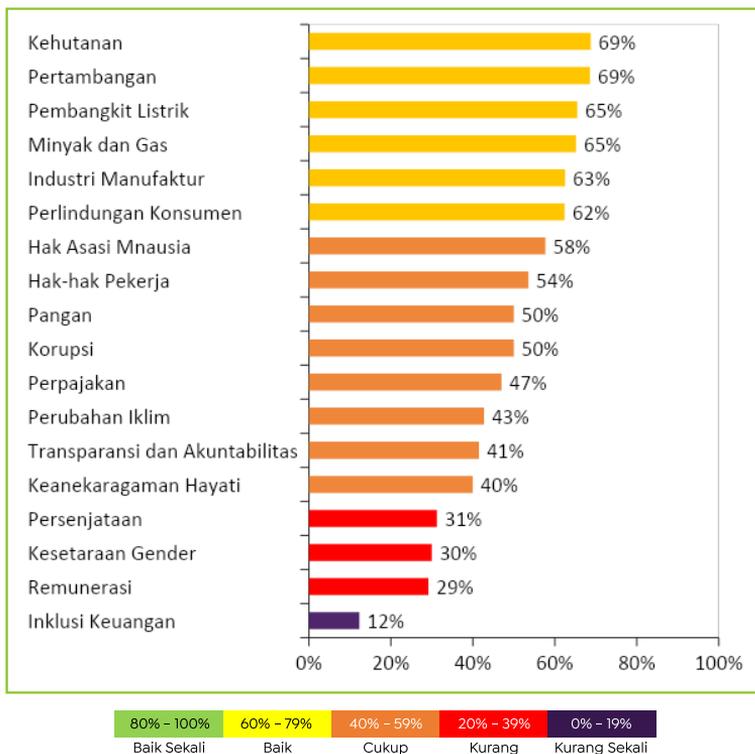
6 persen, perpajakan 6 persen dan keanekaragaman hayati 5 persen. Meskipun skor pada tema keanekaragaman hayati tergolong rendah, Maybank menyatakan akan memperhatikan hasil analisis AMDAL dalam proses analisis kredit terutama untuk debitur yang memiliki skala besar dan risiko tinggi. Sementara itu pada tema industri manufaktur Maybank berkomitmen untuk tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan yang terbukti melanggar undang-undang lingkungan, atau memiliki peringkat Merah atau Hitam dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Pada tema operasional, Maybank tidak memperoleh nilai pada tema remunerasi. Sedangkan, pada tema sektoral Maybank tidak memperoleh nilai pada tema pembangkit listrik, minyak dan gas, pertambangan, kehutanan, pangan dan persenjataan. Pada tema *cross cutting* Maybank tidak memperoleh nilai pada tema hak-hak pekerja, hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal tersebut karena tidak didapatkan informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan oleh bank.

HSBC yang berpusat di Inggris dan Hongkong membuka kantor Indonesia pertamanya di Jakarta (Batavia) pada tahun 1884 untuk mengakomodasi perdagangan komoditas waktu itu. Saat ini HSBC memiliki anak perusahaan dan cabang di sekitar 80 negara di berbagai benua dan merupakan bank dengan besaran aset kedua terbesar di dunia setelah ICBC China. HSBC Indonesia sendiri memiliki modal inti sebesar 16,72 triliun rupiah dan total aset sebesar 88,14 triliun rupiah. Bank HSBC merupakan bank asing dengan aset dan modal inti kedua terbesar di Indonesia

setelah MUFJ. Jumlah nasabah HSBC di Indonesia sekitar 2,5 juta nasabah per April 2013. Dalam penyaluran kreditnya, 39,26% kredit HSBC Indonesia diberikan ke sektor perindustrian (22,57 triliun rupiah); sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 14,57% (8,38 triliun rupiah); sektor pertanian, perhutanan dan pertambangan sebesar 13,44% (7,73 triliun rupiah); sektor jasa keuangan sebesar 9,91% (5,70 triliun rupiah); sektor perumahan sebesar 9,03% (5,19 triliun rupiah); sektor perorangan sebesar 8,97% (5,15%) dan terakhir sektor lain-lain sebesar 4,49% (2,57 triliun rupiah).

Grafik 29. Nilai HSBC pada Semua Tema dan Sektor



HSBC memimpin pemeringkatan pada tahun 2018. HSBC selalu menduduki peringkat pertama pada sebagian besar tema-tema yang dinilai. HSBC memperoleh nilai yang tinggi pada tema sektoral yakni kehutanan 69 persen, pertambangan 69 persen, pembangkit listrik 65 persen, minyak dan gas 65 persen serta industri manufaktur 63 persen. Skor pada tema-tema tersebut diperoleh karena HSBC telah mengadopsi beragam standar dan inisiatif berkelanjutan, seperti *Equator Principles*, *IFC Environmental, Health and Safety Guideline*, *IFC Performance Standard*, *UN Global Compact* dan *UN Principles for Responsible Investment*.

Skor pada tema kehutanan salah satunya diperoleh karena HSBC telah memiliki kebijakan terkait perusahaan yang terlibat di sektor industri pulp dan kertas. Selain itu HSBC juga tidak akan membiayai perusahaan yang terlibat langsung atau memiliki rantai pasok yang terlibat dalam deforestasi, pembalakan liar, penebangan kayu dengan melanggar ketentuan dan penebangan kayu di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCV).

Skor pada tema pertambangan salah satunya diperoleh karena HSBC berkomitmen untuk tidak membiayai proyek yang berdampak pada kerusakan lahan basah menurut konvensi Ramsar (*Ramsar Wetland*). Sementara itu skor pada tema pembangkit listrik salah satunya diperoleh karena HSBC berkomitmen untuk tidak membiayai

proyek pembangkit listrik tenaga batubara baru. Sedangkan, skor pada tema minyak dan gas diperoleh karena HSBC berkomitmen untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) pada proyek pertambangan minyak baru. Skor pada tema industri manufaktur salah satunya diperoleh karena HSBC berkomitmen untuk tidak membiayai perusahaan yang memproduksi senjata kimia ataupun bahan kimia yang tidak sesuai dengan perjanjian internasional. HSBC juga telah bergabung dengan the Ganges Leather Buyers Platform pada 2018 dalam rangka mendukung perusahaan yang ingin mengurangi polusi dalam rantai pasok mereka. Hal ini meningkatkan kesadaran akan dampak penyamakan kulit, mendukung bisnis dalam mengurangi risiko air dan mendorong praktik penyamakan kulit yang berkelanjutan. Skor pada tema perlindungan konsumen diperoleh karena HSBC telah memiliki kebijakan perlindungan data pribadi nasabah dan berkomitmen untuk transparan dalam menyampaikan risiko dan manfaat produk yang disampaikan melalui *HSBC Code of Conduct*. HSBC memiliki skor terendah pada tema inklusi keuangan. Meskipun skor pada tema ini tergolong rendah, HSBC Indonesia telah menginformasikan produk dan layanan di situs web dalam bahasa lokal.



Berdiri pada tahun 1989, PT Bank DBS Indonesia adalah anak perusahaan DBS Ltd. yang berpusat di Singapura. DBS memiliki nilai aset sebesar 65,48 triliun rupiah dan modal inti sebesar 7,83 triliun rupiah per Desember 2017. DBS masuk kedalam kategori bank BUKU 3 dengan modal intiantara 5 sampai 30 triliun rupiah. Saat ini DBS memiliki 44 cabang yang aktif di 13 kota besar di Indonesia yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Pontianak, Samarinda, Bogor, dan Tangerang. Hingga tahun 2017, DBS Indonesia tidak memiliki anak perusahaan. Pada tahun 2017, DBS mencatat pertumbuhan portofolio kredit yang menurun sebesar 0,62% menjadi 40,11 triliun rupiah. Dari keseluruhan pinjaman yang disalurkan, terdapat tiga sektor utama yang paling banyak menerima pinjaman yaitu sektor industri sebesar 31,35% (12,5 triliun rupiah), sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 24,68% (9,84 triliun rupiah) dan sektor pertanian dan perikanan sebesar 16,45% (6,56 triliun rupiah). Komitmen DBS dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan melalui penyaluran kredit energi terbarukan. DBS telah membiayai berbagai macam sektor energi terbarukan seperti geothermal dan hydro. Pada tahun 2017, DBS berperan sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) untuk Geothermal Wayang Windu yang dikelola oleh Star Energy. Sumber energi baru pengganti minyak bumi ini memiliki

kapasitas pembangkit listrik sebesar 220 MW. Dalam penyaluran kredit energi terbarukan, DBS telah mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Di Kuartal IV tahun 2017, DBS telah menolak 3 dari 15 aplikasi kredit yang menerima uji LST tambahan karena ditemukannya pelanggaran atas aspek LST. Pada tahun 2017, DBS menjadi bank Asia dan perusahaan Singapura pertama yang bergabung dalam inisiatif energi terbarukan, RE100. Kelompok kolaboratif yang diiniasi oleh bisnis global paling berpengaruh ini berkomitmen dalam penggunaan 100% energi terbarukan.

Tahun 2018 adalah pertama kalinya DBS masuk pada penilaian *Bank Assessment*. DBS berada posisi ke-2 setelah HSBC dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 32 persen. DBS memperoleh skor tertinggi pada tema persenjataan dengan nilai 68 persen. DBS memperoleh skor tertinggi pada tema persenjataan karena telah berkomitmen untuk tidak membiayai kegiatan produksi dan perdagangan alat persenjataan atau membiayai pabrik yang menghasilkan produk dan jasa yang mendukung kegiatan produksi dan perdagangan alat persenjataan dan senjata kecil.

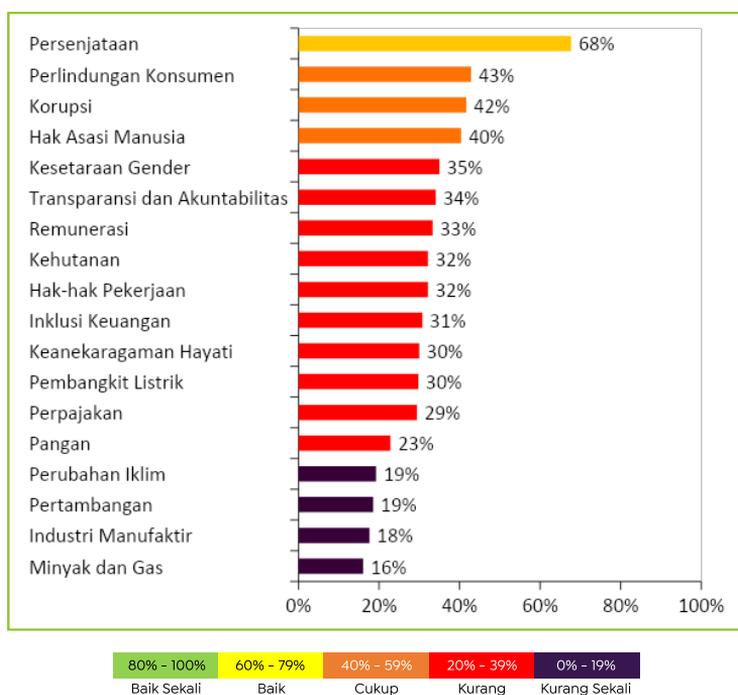
DBS memperoleh nilai yang cukup pada tema perlindungan konsumen, korupsi dan hak asasi manusia. Skor pada tema perlindungan konsumen salah satunya diperoleh karena DBS

telah memiliki kebijakan yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah dan prosedur yang jelas dalam kasus perampokan, pencurian dan penipuan yang melibatkan nasabah di kantor cabang maupun di ATM. Sedangkan, skor pada tema korupsi diperoleh karena DBS secara jelas menyatakan bahwa tidak akan mentoleransi segala bentuk kejahatan finansial, termasuk penyuapan dan korupsi. HSBC juga berupaya menjalankan bisnis secara adil dan bertanggung jawab dengan menawarkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sementara itu pada tema hak asasi manusia, DBS tidak akan membiayai kegiatan, perusahaan atau proyek yang melibatkan pekerja anak atau pekerja paksa dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

DBS memperoleh nilai yang sangat rendah pada tema perubahan iklim, pertambangan, industri manufaktur dan minyak dan gas. Meskipun skor pada tema perubahan iklim tergolong rendah, DBS telah berkomitmen untuk meningkatkan portofolio pembiayaan energi terbarukan dan

teknologi berbasis bahan bakar fosil yang lebih efisien. Sementara itu pada tema pertambangan DBS berkomitmen untuk menghentikan pembiayaan tambang batubara termal baru (*greenfield*) dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi sebelum menyalurkan pembiayaan akuisisi tambang batubara termal. Lebih jauh, pada tema minyak dan gas DBS berkomitmen untuk tidak terlibat dalam eksplorasi atau produksi gas tanpa memperhatikan pengelolaan kebocoran gas metana.

Grafik 30. Nilai DBS pada Semua Tema dan Sektor





www.responsibank.id



ISBN 978-623-95082-6-5



9 786239 508265